



PEMERINTAHAN KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA



LRJIP

**BAPPEDA
KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA**

**TAHUN ANGGARAN
2025**

BerAKHLAK
Berkorban, Berprestasi, Berkeadilan, Berkeadilan
Berakhlak, Berprestasi, Berkeadilan, Berkeadilan

**#bangga
melayani
bangsa**



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa.

Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 dapat diselesaikan. Dokumen ini merefleksikan perjalanan kinerja kami pada tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Tahun 2021–2026.

Penyusunan laporan ini bukan sekadar rutinitas pemenuhan kewajiban administratif sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014. Lebih dari itu, LKjIP ini adalah wujud pertanggungjawaban moral dan profesional Bappeda dalam mengawal kualitas perencanaan pembangunan daerah. Kami menyadari bahwa akuntabilitas bukan hanya soal bagaimana anggaran dihabiskan, tetapi seberapa besar *outcome* dan dampak yang dihasilkan bagi kemajuan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sepanjang tahun 2025, Bappeda dihadapkan pada dinamika tantangan pembangunan yang kompleks, mulai dari akselerasi transformasi ekonomi hingga penyelarasan agenda daerah sebagai mitra strategis Ibu Kota Nusantara (IKN). Melalui pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ketat, kami berupaya memotret capaian kinerja secara objektif. Kendati secara umum target kinerja telah berada pada jalur yang tepat (*on-track*), kami tetap melakukan evaluasi mendalam terhadap berbagai kendala internal maupun eksternal guna merumuskan strategi adaptasi yang lebih lincah (*agile*).

Kami berharap, dokumen ini tidak berakhir di meja arsip, melainkan menjadi basis data (*evidence-based*) bagi seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*). Semoga ikhtiar ini berkontribusi nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi (*Good Governance and Clean Government*).

Kutai Kartanegara, 27 Februari 2026
Plt. Kepala Badan Perencanaan Dan Pembangunan
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara



SYARIFAH VANESA VILNA SIS, S.E., M.M

NIP. 19740217 199703 2 004



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	iiiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
1.3 Isu Strategis Perangkat Daerah	4
1.4 Landasan Hukum	5
1.5 Sistematika	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	7
2.1.1 Visi	8
2.1.2 Misi	8
2.1.3 Tujuan dan Sasaran	8
2.1.4 Indikator Kinerja Utama	10
2.2 Rencana Kerja Tahun 2025	155
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	49
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	65
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	6565
3.1.1 Skala Capaian Kinerja	65
3.1.2 Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun Pelaporan	67
3.1.3 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja	70
3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Anggaran dengan Target Jangka Menengah	73



3.1.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Anggaran dengan Standar Nasional dan Provinsi	76
3.1.6	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi yang Dilakukan	80
3.1.7	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	85
3.1.8	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	89
3.1.9	Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP Tahun Sebelumnya	168
3.2	Realisasi Anggaran.....	172
3.3	Capaian Indikator Kinerja Utama Tambahan 2024	202
BAB IV PENUTUP		207



DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

TABEL

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	9
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.....	12
Tabel 2.3 Rencana Kerja Tahun 2025 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.....	177
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025.....	50
Tabel 2.5 Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025	52
Tabel 3.1 Kategori Capaian Kinerja.....	666
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2025	68
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 dan 2025	71
Tabel 3.4 Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis	73
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Anggaran dengan Standar Nasional dan Provinsi	77
Tabel 3.6 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi yang Dilakukan	82
Tabel 3.7 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	87
Tabel 3.8 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	90
Tabel 3.9 Nilai Hasil Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 dan 2025.....	168



Tabel 3.10 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2024.....	1683
---	------

Tabel 3.11 Capaian Indikator Kinerja Utama Tambahan 2024	202
--	-----

GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara...	3
---	---



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Paradigma manajemen pemerintahan modern menuntut pergeseran orientasi dari sekadar penyerapan anggaran (*budget absorption*) menjadi pencapaian hasil kinerja yang berdampak (*result oriented government*). Dalam ekosistem ini, kepercayaan publik tidak lagi dibangun di atas opini administrasi semata, melainkan pada seberapa besar kehadiran pemerintah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semangat inilah yang melandasi terbitnya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014, yang mewajibkan instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya secara terukur, transparan, dan akuntabel.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Kartanegara memegang peran sentral sebagai *clearing house* atau pengambil kebijakan pembangunan daerah. Pada tahun 2025, peran ini menjadi semakin krusial mengingat posisi strategis Kutai Kartanegara sebagai mitra utama Ibu Kota Nusantara (IKN) serta tantangan akselerasi transformasi ekonomi pasca-tambang. Bappeda tidak hanya dituntut menyusun dokumen perencanaan yang teknokratis, tetapi juga harus mampu mengorkestrasi seluruh Perangkat Daerah agar bergerak sinergis mencapai target makro pembangunan, seperti pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia.

Sebagai pengejawantahan prinsip akuntabilitas tersebut, Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025. Dokumen ini disusun bukan sekadar untuk menggugurkan kewajiban administratif, melainkan sebagai instrumen evaluasi kritis terhadap ketercapaian visi, misi, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diperjanjikan. Melalui LKjIP ini, Bappeda menyajikan potret utuh kinerja organisasi mulai dari keberhasilan yang diraih hingga kendala yang dihadapi guna merumuskan strategi perbaikan kinerja yang berkelanjutan (*continuous improvement*) di masa mendatang.

1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Postur kelembagaan Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara didesain dengan prinsip "tepat fungsi dan tepat ukuran" (*right sizing*) guna merespons dinamika pembangunan yang cepat dan adaptif. Landasan operasional struktur ini mengacu pada Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 44 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Secara kedudukan, Bappeda bertindak sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Posisi ini menempatkan Bappeda sebagai *strategic enabler* atau penggerak utama dalam menerjemahkan visi politik kepala daerah menjadi dokumen perencanaan teknokratis yang terukur.

Dalam kerangka operasionalnya, Bappeda tidak hanya menjalankan fungsi administratif, melainkan menjalankan siklus manajemen kinerja yang holistik, meliputi:

1. Perumusan Kebijakan (*Policy Formulation*), Menyusun arah kebijakan perencanaan pembangunan yang selaras dengan prioritas nasional dan daerah.
2. Eksekusi Perencanaan (*Planning Execution*), Mengoordinasikan pelaksanaan program kerja dan administrasi perencanaan lintas sektor.
3. Pengendalian Kualitas (*Quality Assurance*), Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan untuk memastikan deviasi pelaksanaan tetap dalam koridor target yang ditetapkan.

Guna mendukung akselerasi fungsi tersebut, arsitektur organisasi Bappeda mengadopsi pola kerja yang kolaboratif antara unit struktural dan fungsional. Struktur ini dipimpin oleh seorang Kepala Badan, dibantu oleh Sekretaris dan Kepala Bidang sebagai manajer kinerja, serta didukung oleh Kelompok Jabatan Fungsional yang berperan sebagai *subject matter experts* (ahli teknis). Sinergi ini dimaksudkan untuk menciptakan birokrasi yang lebih cair (*agile*) dan kaya fungsi.

Visualisasi struktur organisasi Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara secara rinci dapat dilihat pada bagan berikut :



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara



Sumber: Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 44 Tahun 2023

1.3 Isu Strategis Perangkat Daerah

Dinamika pembangunan daerah tidak pernah berjalan dalam ruang hampa. Ia senantiasa dipengaruhi oleh volatilitas lingkungan strategis, baik pada skala global, nasional, maupun regional. Oleh karena itu, identifikasi isu strategis menjadi langkah fundamental bagi Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara untuk memastikan arsitektur perencanaan yang disusun memiliki **agilitas** dan **relevansi** tinggi terhadap kebutuhan masyarakat.

Tahun 2025 menjadi momentum krusial bagi Kabupaten Kutai Kartanegara. Kesiapan daerah dalam menghadapi dinamika pembangunan nasional tercermin dari solidnya kinerja inti perencanaan daerah. Bappeda membuktikan konsistensi kualitasnya dengan mencatatkan Skor Penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) sebesar 3.37, melampaui target strategis yang ditetapkan sebesar 2.50. Capaian kinerja dengan predikat 'Sangat Tinggi' (134,8%) ini menjadi modalitas utama bagi Bappeda. Dengan kualitas perencanaan yang telah teruji tersebut, Bappeda dituntut untuk tidak lagi sekedar bekerja pada level administratif, melainkan mampu melakukan eskalasi peran sebagai 'otak' transformasi daerah yang adaptif dan berbasis digital guna mengimbangi posisi strategis Kutai Kartanegara sebagai mitra Ibu Kota Nusantara (IKN).

Mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Bappeda 2021-2026 serta hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya, terdapat 7 (tujuh) isu strategis yang menjadi fokus penanganan prioritas pada tahun anggaran 2025, yaitu:

1. Transformasi Digital Perencana (*Smart Planner*), Tuntutan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mengharuskan peningkatan kualitas SDM perencana yang tidak hanya memahami substansi, tetapi juga menguasai teknologi informasi (IT) untuk analisis *Big Data*.
2. Konektivitas dan Kesiapan Daerah Mitra IKN, Memastikan dokumen perencanaan tata ruang dan wilayah mampu merespons dampak masif pemindahan IKN ke Kalimantan Timur, baik dari sisi demografi, ekonomi, maupun infrastruktur.
3. Integritas Data Pembangunan (*Evidence-Based Policy*), Urgensi penyajian data dan informasi pembangunan yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi (Satu Data) sebagai basis pengambilan keputusan yang presisi.

4. Agilitas terhadap Dinamika Regulasi, Kemampuan organisasi untuk merespons perubahan regulasi pusat yang cepat (seperti UU HKPD dan aturan turunannya) agar sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah tetap terjaga.
5. Disparitas dan Pengembangan Wilayah, Perencanaan yang responsif untuk mengurangi ketimpangan antar-wilayah, khususnya antara kawasan *hinterland* dengan pusat pertumbuhan baru di sekitar IKN.
6. Integrasi Perencanaan *Multi-Level*, Memperkuat "benang merah" perencanaan (*cascading*) mulai dari Desa, Kabupaten, Provinsi, hingga Nasional untuk memastikan efisiensi penggunaan anggaran.
7. Resiliensi Ekonomi Pasca-Pandemi, Melanjutkan penyesuaian pembangunan nasional berbasis adaptasi kebiasaan baru, dengan fokus pada transformasi ekonomi hijau (*Green Economy*) untuk mengurangi ketergantungan pada sektor ekstraktif.

Ketujuh isu strategis tersebut dikelola secara integratif dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Tahun 2025. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa fungsi Bappeda sebagai "otak pembangunan daerah" dapat berjalan optimal dalam mengawal pencapaian visi dan misi Kepala Daerah

1.4 Landasan Hukum

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

- 1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 Nomor 17);
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2042;

- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2021 – 2026;
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 9);
- 7) Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026; dan
- 8) Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 44 Tahun 2023, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

1.5 Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 berupa :

BAB I	PENDAHULUAN
	Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum, dan Sistematika.
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	Meliputi Perencanaan Strategis Perangkat Daerah.
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.
BAB IV	PENUTUP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan teknokratis yang berfungsi sebagai peta jalan (*roadmap*) kinerja organisasi jangka menengah. Dokumen ini disusun tidak hanya untuk memenuhi aspek legalitas formal berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021, melainkan sebagai instrumen strategis untuk menerjemahkan visi politik Kepala Daerah ke dalam program pembangunan yang konkret, terukur, dan berdampak.

Penetapan horizon waktu lima tahunan ini didesain untuk menjamin akuntabilitas dan kesinambungan program (*sustainability*) yang selaras dengan masa jabatan Kepala Daerah. Dalam proses penyusunannya, Renstra Bappeda telah melalui penyelarasan substansi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta melibatkan partisipasi aktif pemangku kepentingan (*stakeholders*) melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Hal ini memastikan bahwa arah kebijakan Bappeda memiliki legitimasi publik dan relevansi yang kuat terhadap kebutuhan pembangunan daerah.

Rencana Strategis Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026. Proses penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ini melalui beberapa tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026. Proses tersebut di antaranya melibatkan *stakeholders* pada saat pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD serta Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan hasil kesepakatan bersama antara Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara dan *stakeholder*.

Selanjutnya, rencana strategis ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang merupakan dokumen perencanaan tahunan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pada Renja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara, telah termuat program dan kegiatan

prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang. Berikut adalah penjelasan Visi dan Misi, serta Tujuan dan Sasaran Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara:

2.1.1 Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada masa mendatang. Visi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 adalah:

***“Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang
Sejahtera dan Berbahagia”***

2.1.2 Misi

Guna mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, maka dirumuskan 5 (lima) Misi sebagai berikut:

- Misi 1: Memantapkan Birokrasi yang Bersih, Efektif, Efisien, dan Melayani
- Misi 2: Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, Unggul, dan Berdaya
- Misi 3: Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif
- Misi 4: Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Antarwilayah
- Misi 5: Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan

Perumusan tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengacu pada Misi ke-1, yaitu:

***“Memantapkan Birokrasi yang Bersih, Efektif, Efisien dan
Melayani”***

2.1.3 Tujuan dan Sasaran

Dalam hierarki perencanaan kinerja, penetapan tujuan dan sasaran bukan sekadar aktivitas pengisian formulir, melainkan proses menerjemahkan visi abstrak menjadi parameter keberhasilan yang konkret. Tujuan (*Goals*) merepresentasikan dampak jangka menengah yang ingin diwujudkan dalam periode lima tahun, sedangkan Sasaran (*Objectives*) merupakan ukuran keberhasilan tahunan yang lebih spesifik, terukur, dan berorientasi hasil (*result oriented*).

Sebagai *clearing house* pembangunan daerah, Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan arsitektur kinerja yang ringkas namun berdampak (*lean and agile*), berfokus pada satu tujuan strategis dan satu sasaran strategis utama. Penyederhanaan ini dimaksudkan agar seluruh sumber daya organisasi terkonsolidasi untuk menyelesaikan isu strategis utama, yakni kualitas perencanaan.

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Meningkatnya Kinerja Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan		Rata-rata capaian indikator tujuan daerah	75	85	87	90	93
1.1		Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Skor Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Skala Regional/Provinsi	2,20	2,30	2,40	2,50	2,60
			Rata-rata capaian indikator sasaran daerah	94.00	95.00	96.00	96.50	97.00

Sumber: Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah periode 2021-2026

Berdasarkan arsitektur kinerja yang tersaji dalam tabel di atas, Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan "Meningkatnya Kinerja Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan" sebagai Tujuan Strategis (*Ultimate Outcome*). Keberhasilan tujuan ini diukur melalui indikator makro "Rata-Rata Capaian Indikator Tujuan Daerah". Indikator ini dipilih sebagai representasi agregat untuk

memastikan bahwa dokumen perencanaan yang disusun Bappeda benar-benar memiliki daya ungkit terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah secara menyeluruh.

Untuk mengoperasionalkan tujuan tersebut, ditetapkan Sasaran Strategis berupa "Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah". Sasaran ini dikawal melalui dua indikator kinerja yang saling melengkapi (*mutually exclusive collectively exhaustive*), yaitu:

1. Skor Perencanaan Pembangunan Daerah, Indikator ini berfungsi untuk mengukur kualitas teknokratis dan inovasi dokumen perencanaan dalam skala regional/provinsi
2. Rata-Rata Capaian Indikator Sasaran Daerah, Indikator ini berfungsi untuk mengukur efektifitas fungsi pengendalian Bappeda terhadap kinerja perangkat daerah

Komitmen Bappeda terhadap prinsip perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) tercermin secara nyata dari penetapan target kinerja yang bersifat progresif sepanjang periode 2022-2026. Tren target yang terus meningkat ini menegaskan bahwa Bappeda tidak bekerja dalam zona nyaman, melainkan senantiasa menetapkan standar kinerja yang menantang (*challenging*) namun tetap realistis, guna mendorong akselerasi kualitas pembangunan daerah yang lebih presisi dan akuntabel.

2.1.4 Indikator Kinerja Utama

Dalam ekosistem manajemen kinerja modern, Indikator Kinerja Utama (IKU) bukan sekadar alat ukur statistik, melainkan instrumen navigasi strategis yang mengarahkan seluruh sumber daya organisasi menuju pencapaian tujuan. Penetapan IKU Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan secara selektif dengan prinsip "Sedikit namun Berdampak" (*Few but Critical*), untuk memastikan fokus organisasi tidak terpecah pada hal-hal administratif yang kurang relevan.

IKU yang ditetapkan merupakan ukuran keberhasilan dari Sasaran Strategis yang telah dirumuskan sebelumnya. Indikator ini berfungsi sebagai sinyal (*dashboard*) bagi pimpinan untuk mendeteksi apakah kinerja organisasi berada pada jalur yang tepat (*on-track*) atau memerlukan intervensi korektif.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan indikator kinerja yang merepresentasikan dua dimensi kinerja utama, yaitu :



1. Dimensi Kualitas Perencanaan yang diukur melalui Skor Penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD). Indikator ini dipilih untuk menjamin bahwa dokumen perencanaan yang dihasilkan memenuhi standar teknokratis, partisipatif, dan inovatif sesuai kriteria penilaian nasional.
2. Dimensi Efektivitas Pengendalian yang diukur melalui Rata-rata Capaian Indikator Sasaran Daerah. Indikator ini merefleksikan keberhasilan fungsi "pengendalian" Bappeda dalam mengawal kinerja perangkat daerah agar mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 adalah sebagai berikut :



Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN				KETERANGAN
				DISKRIPSI INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	
1	Meningkatnya kinerja Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan	Rata-rata Capaian Indikator Tujuan Daerah	Persen	Merupakan alat ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola dan menyelenggarakan pembangunan yang efektif sesuai dengan visi dan misi yang tertuang dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) atau RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Indikator Tujuan Daerah antara lain : 1. Indeks Reformasi Birokrasi 2. Indeks Pembangunan Manusia 3. Tingkat Kebahagiaan 4. Tingkat Kemiskinan 5. Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Non Migas dan Batu Bara 6. Indeks Kesulitan Geografis 7. Persentase penurunan kawasan kumuh / Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh 8. Persentase penurunan Emisi GRK	Merupakan nilai rata-rata yang diperoleh dari hasil perbandingan antara realisasi Kinerja dengan target yang telah ditetapkan pada seluruh Indikator Tujuan Pembangunan Daerah dalam satu periode tertentu	$\text{Rata-rata} = \frac{\sum \text{Capaian Indikator Tujuan}}{\text{Jumlah Indikator Tujuan}}$	Dari Badan Pusat Statistik dan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama
2	Meningkatnya Kualitas	Skor Penilaian Penghargaan	Skor	Merupakan nilai komposit yang diperoleh pemerintah	Nilai akhir yang diperoleh Pemerintah Daerah	Score Penilaian Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah skor	Hasil Evaluasi	Indikator Kinerja Utama



NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN				KETERANGAN
				DISKRIPSI INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	
	Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan Daerah		daerah dalam proses evaluasi perencanaan pembangunan yang diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	berdasarkan hasil Evaluasi Komprehensif terhadap kualitas, konsistensi, Integrasi, Inovasi, serta capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai kriteria dan bobot penilaian yang ditetapkan dalam mekanisme Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah	penilaian yang diberikan oleh Pemerintah Propinsi kepada Pemerintah Kabupaten dalam rangka Penyusunan Perencanaan secara Komprehensif dan terukur dengan kriteria : 1. Aspek Pencapaian Pembangunan (40%) 2. Aspek Kualitas Dokumen Perencanaan (40%) 3. Aspek Inovasi (20%)	terhadap Dokumen penilaian PPD oleh Bappeda Provinsi Kalimantan Timur	
		Rata-rata capaian Indikator Sasaran Daerah	Persen	Merupakan ukuran komposit yang menggambarkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai seluruh indikator kinerja pada level sasaran pembangunan daerah dalam satu periode tertentu. Indikator sasaran daerah antara lain : 1. NILAI SAKIP 2. Indeks Persepsi Anti Korupsi 3. Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik 4. Indeks Pendidikan 5. Indeks Pembangunan Kebudayaan 6. Indeks Kesehatan 7. Indeks Pembangunan Gender 8. Indeks Gini	Merupakan nilai rata-rata Persentase capaian seluruh Indikator kinerja pada level Sasaran Daerah dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah pada periode tertentu	$\text{Rata-rata} = \frac{\sum \text{Capaian Indikator Sasaran}}{\text{Jumlah Indikator Sasaran}}$	Dari Badan Pusat Statistik dan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama



NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN				KETERANGAN
				DISKRIPSI INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	
				9. Indeks Desa Membangun 10. Tingkat Pengangguran Terbuka 11. PDRB Per Kapita 12. Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 13. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata 14. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif 15. Tingkat Pertumbuhan Investasi 16. Cakupan Layanan Air Bersih 17. Presentase Rumah Layak Huni 18. Indeks Aksesibilitas Wilayah 19. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 20. Indeks Risiko Bencana				

Sumber: Renstra Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026

Berdasarkan tabel di atas, Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari 2 (dua) indikator pada Sasaran organisasi. Indikator tujuan mengukur realisasi dari kinerja tujuan organisasi, sedangkan Indikator sasaran mengukur realisasi dari kinerja sasaran organisasi, sebagaimana dijelaskan pada Renstra Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026.

2.2 Rencana Kerja Tahun 2025

Sebagai penjabaran operasional dari Rencana Strategis (Renstra) periode 2021-2026, Rencana Kerja (Renja) memegang peranan krusial sebagai instrumen navigasi tahunan organisasi. Bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Kartanegara, Renja Tahun 2025 bukan sekadar dokumen administratif pemenuhan kewajiban, melainkan cetak biru (*blueprint*) taktis yang memetakan arah kebijakan, program prioritas, dan alokasi sumber daya dalam satu tahun anggaran. Dokumen ini disusun dengan mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) guna memastikan terciptanya keselarasan (*alignment*) absolut antara target internal instansi dengan sasaran makro pembangunan kabupaten.

Arsitektur Rencana Kerja Tahun 2025 didesain menggunakan pendekatan manajemen berbasis kinerja (*performance-based planning*). Dalam kerangka ini, setiap rumusan kegiatan dan sub kegiatan yang dirancang harus memiliki garis turunan logika (*cascading*) yang jelas terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Prinsip fundamental yang dikedepankan oleh Bappeda adalah tata kelola anggaran yang efisien dan berdampak, sejalan dengan paradigma *Money Follow Program*. Melalui rasionalisasi ini, organisasi memastikan bahwa seluruh sumber daya yang terbatas difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang memiliki daya ungkit (*leverage*) langsung terhadap peningkatan kualitas perencanaan teknokratis maupun efektivitas pengendalian pembangunan di daerah.

Secara spesifik, postur Rencana Kerja Bappeda Tahun 2025 difokuskan pada pengawalan 2 (dua) sasaran strategis utama organisasi. Strategi pencapaian sasaran tersebut didistribusikan ke dalam **3 (tiga) program pilar**, yakni: (1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; (2) Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah; serta (3) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Ketiga



program ini ditopang oleh kegiatan dan sub kegiatan teknis dengan target keluaran (*output*) yang terukur secara definitif.

Sebagai wujud komitmen terhadap rancang bangun perencanaan yang akuntabel, kerangka logis dari program, kegiatan, indikator keluaran, beserta target capaian yang akan dieksekusi sepanjang tahun berjalan telah disusun secara sistematis. Rincian operasionalisasi dari intervensi strategis Bappeda tersebut direpresentasikan melalui matriks Rencana Kerja berikut ini :



Tabel 2.3 Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	RENCANA KINERJA TAHUN 2025	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kinerja Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah			Rata-rata capaian indikator tujuan daerah	Persen	Tenggarong	90
2		Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah		Skor Penilaian Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai	Tenggarong	2,50
3				Rata-rata capaian indikator sasaran daerah	Persen	Tenggarong	96,50



NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	RENCANA KINERJA TAHUN 2025	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
4			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	Tenggarong	88,85
5			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	Tenggarong	9
6			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Tenggarong	3



NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	RENCANA KINERJA TAHUN 2025	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
7			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Tenggarong	3
8			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Tenggarong	1
9			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	Tenggarong	1



NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	RENCANA KINERJA TAHUN 2025	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
10			Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang diampu dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Berita Acara	Tenggarong	1
11			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	Tenggarong	6
12			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Tenggarong	1392



NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	RENCANA KINERJA TAHUN 2025	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
13			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan		6
14			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rencana	Tenggarong	4
15			Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Tenggarong	1



NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	RENCANA KINERJA TAHUN 2025	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
16			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Tenggarong	3
17			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	Tenggarong	8
				Jumlah Pakaian	Stel	Tenggarong	116
				Jumlah ASN	Orang	Tenggarong	60



NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	RENCANA KINERJA TAHUN 2025	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
18			Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Tenggarong	3
19			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	Tenggarong	8
20			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	Tenggarong	60



NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	RENCANA KINERJA TAHUN 2025	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
21			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	Tenggarong	9
22			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Tenggarong	1
23			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Tenggarong	3



NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	RENCANA KINERJA TAHUN 2025	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
24			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Tenggarong	2
25			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Tenggarong	3
26			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jenis/Paket	Tenggarong	4



NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	RENCANA KINERJA TAHUN 2025	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
27			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Tenggarong	150
28			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	Tenggarong	5
29			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	Tenggarong	1



NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	RENCANA KINERJA TAHUN 2025	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
30			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen	Tenggarong	100
31			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Tenggarong	1
32			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	Tenggarong	12



NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	RENCANA KINERJA TAHUN 2025	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
33			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Tenggarong	12
34			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Tenggarong	12
35			Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah	Persen	Tenggarong	100



NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	RENCANA KINERJA TAHUN 2025	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
36			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Tenggarong	21
37			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Tenggarong	28
38			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Unit	Tenggarong	6



NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	RENCANA KINERJA TAHUN 2025	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
39			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Unit	Tenggarong	11
40			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan pada sasaran daerah	Persen	Tenggarong	100
41			Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Dokumen	Tenggarong	6



NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	RENCANA KINERJA TAHUN 2025	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Jumlah Pendampingan perencanaan	OPD	Tenggarong	59
				Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kali	Tenggarong	2
				Jumlah Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Forum	Tenggarong	72



NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	RENCANA KINERJA TAHUN 2025	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Jumlah pelaksanaan Musrenbang	Kali	Tenggarong	2
42			Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen	Tenggarong	2
43			Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	Tenggarong	1



NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	RENCANA KINERJA TAHUN 2025	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
44			Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	Tenggarong	2
45			Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	Tenggarong	72
46			Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	Tenggarong	2



NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	RENCANA KINERJA TAHUN 2025	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
47			Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan	Tenggarong	20
48			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	Tenggarong	3
49			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	Masukan	Tenggarong	4



NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	RENCANA KINERJA TAHUN 2025	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Jumlah pendampingan ketersediaan data	Urusan	Tenggarong	32
				Jumlah layanan data dan informasi kecamatan	Layanan Data dan Informasi	Tenggarong	1
				Jumlah Rancangan Regulasi Daerah	Rancangan Regulasi Daerah	Tenggarong	0



NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	RENCANA KINERJA TAHUN 2025	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Jumlah Personil Pembinaan Data	Orang	Tenggarong	177
50			Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Masukan	Tenggarong	3
51			Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	Tenggarong	177



NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	RENCANA KINERJA TAHUN 2025	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
52			Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku	Tenggarong	2
53			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	Tenggarong	7
54			Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	Tenggarong	2



NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	RENCANA KINERJA TAHUN 2025	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
55			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	Tenggarong	5
56			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan bidang perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan pada Renja-PD	Persen	Tenggarong	100
				Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Renja-PD	Persen	Tenggarong	100



NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	RENCANA KINERJA TAHUN 2025	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan Bidang Bidang Sarana dan Prasarana Pengembangan Wilayah pada Renja-PD	Persen	Tenggarong	100
57			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Dokumen	Tenggarong	81
58			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Dokumen	Tenggarong	11



NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	RENCANA KINERJA TAHUN 2025	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
59			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Tenggarong	11
60			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	Tenggarong	12
61			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	Tenggarong	3



NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	RENCANA KINERJA TAHUN 2025	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
62			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Dokumen	Tenggarong	13
63			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	Tenggarong	13
64			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	Tenggarong	13



NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	RENCANA KINERJA TAHUN 2025	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
65			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	Tenggarong	6
66			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Dokumen	Tenggarong	38
67			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Dokumen	Tenggarong	6



NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	RENCANA KINERJA TAHUN 2025	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
68			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	Tenggarong	6
69			Pelaksanaan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	Tenggarong	6
70			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	Tenggarong	3



NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	RENCANA KINERJA TAHUN 2025	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
71			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Dokumen	Tenggarong	5
72			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Perangkat Daerah	Tenggarong	5
73			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Perangkat Daerah	Tenggarong	5



NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	RENCANA KINERJA TAHUN 2025	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
74			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	Tenggarong	2
75			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Dokumen	Tenggarong	71
76			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Dokumen	Tenggarong	4



NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	RENCANA KINERJA TAHUN 2025	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
77			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	Tenggarong	4
78			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	Tenggarong	4
79			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	Tenggarong	3



NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	RENCANA KINERJA TAHUN 2025	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
80			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Dokumen	Tenggarong	20
81			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	Tenggarong	20
82			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	Tenggarong	20



NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	RENCANA KINERJA TAHUN 2025	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
83			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	Tenggarong	2

Sumber: Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025

Formulasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang terstruktur dalam matriks di atas berfungsi sebagai fondasi utama bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda sepanjang tahun 2025. Dengan adanya parameter target teknis yang presisi, dokumen Rencana Kerja Tahunan ini selanjutnya bertransformasi menjadi garis dasar (*baseline*) dalam penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) pimpinan, sekaligus menjadi tolok ukur utama dalam tahapan evaluasi akuntabilitas kinerja di penghujung tahun anggaran.

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan instrumen fundamental dalam ekosistem Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini bukan sekadar pemenuhan syarat administratif, melainkan sebuah kontrak manajerial yang mengikat komitmen antara pimpinan institusi dengan pemberi mandat terkait target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun anggaran. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah pendelegasian wewenang yang terukur (*outcome-based*), sekaligus menjadi parameter objektif bagi kepala daerah untuk melakukan evaluasi tingkat keberhasilan organisasi.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 dilaksanakan secara simultan pasca-penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Proses formulasi ini dilakukan dengan menyelaraskan target-target strategis jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026, yang kemudian diturunkan secara taktis ke dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025.

Dalam arsitektur kinerja tahun 2025, Kepala Bappeda tidak hanya berkomitmen pada pencapaian indikator teknokratis di bidang perencanaan, tetapi juga memikul tanggung jawab yang sifatnya kontributif dan kolektif atas indikator Reformasi Birokrasi (RB) makro yang mencakup kualitas layanan publik, akuntabilitas tata kelola, hingga penciptaan inovasi daerah.

Pada tanggal 20 bulan Januari tahun 2025 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan uraian sebagai berikut :

**Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025**

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah	Skor penilaian penghargaan perencanaan pembangunan daerah	Skor	2,50
		Rata-rata capaian indikator sasaran daerah	Persen	96,50
2	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut Hasil Forum Konsultasi Publik(FKP)	Persen	100
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	88,30
4	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100
5	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah	Level	3
6	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1
7	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100
8	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterimputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	100

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
9	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di Perangkat Daerah	Jumlah laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48
10	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	77
11	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih, dan melayani	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65
12	Pengendalian Inflasi	Angka Inflasi	Nilai	3,1

Sumber: Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025

Komitmen strategis yang tertuang dalam matriks Perjanjian Kinerja di atas tidak dibiarkan berhenti sebagai deretan angka di atas kertas. Guna memastikan seluruh indikator kinerja tersebut dapat terealisasi, rumusan sasaran strategis didistribusikan dan dijabarkan (*cascading*) ke dalam rencana operasional organisasi.

Dalam kerangka hubungan kausalitas ini, setiap target kinerja utama ditopang oleh serangkaian program, kegiatan, hingga sub kegiatan prioritas yang disertai dengan alokasi pendanaan yang presisi. Pendekatan ini merupakan manifestasi dari prinsip *Money Follow Program*, yang memastikan bahwa postur anggaran tidak dibagi rata secara proporsional (*even distribution*), melainkan difokuskan sepenuhnya pada kegiatan-kegiatan yang memiliki daya ungkit (*leverage*) tinggi terhadap sasaran organisasi.

Untuk merealisasikan janji kinerja tahun 2025, intervensi anggaran Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara senilai Rp.46.601.291.935,- dikonstruksikan ke dalam dua koridor strategis, yaitu:

1. Koridor *Core Business* (Substansi Perencanaan) Berfungsi untuk mencapai sasaran utama "Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengendalian

Pembangunan Daerah" Bappeda menggerakkan dua program pilar, yakni Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Fokus utamanya adalah memastikan konsistensi dan sinergitas dokumen perencanaan dari level makro kabupaten hingga penjabaran di tingkat Perangkat Daerah.

2. Koridor *Enabler* (Penunjang Tata Kelola) Berfungsi untuk memastikan tercapainya indikator manajerial yang diukur dengan Nilai SAKIP Perangkat Daerah. Koridor ini diampu oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang bertugas memperkuat tata kelola administrasi keuangan, manajemen aset, peningkatan kapasitas SDM perencana, serta penyediaan infrastruktur digital yang krusial untuk menciptakan iklim kerja yang profesional.

Sinergi yang solid antara target kinerja dan intervensi operasional ini menjadi jaminan rasionalitas bahwa setiap rupiah yang dikelola akan bermuara pada hasil yang nyata. Rincian penjabaran Program dan Kegiatan Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 disajikan pada matriks berikut:

Tabel 2.5 Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	88.85 Nilai	36.598.794.501,0 0
I.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	423.695.920,00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	286.955.800,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen capaian dan ikhtisar realisasi kinerja	2 Laporan	36.308.000,00



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	77.355.500,00
4	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	23.076.620,00
I.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	6 Laporan	16.526.209.186,00
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	1458 Orang/Bulan	16.216.844.386,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	309.364.800,00
I.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	4 Dokumen	119.892.400,00
1	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	27.600.000,00
2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	92.292.400,00
I.4	Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	8 Dokumen	856.946.836,00
		Jumlah Pakaian	368 Stel	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
		Jumlah ASN	30 Orang	
1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	8 Dokumen	75.518.000,00
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	168.018.836,00
3	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	613.410.000,00
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 Layanan	3.291.662.230,00
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	200.000.000,00
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis bahan logistik Kantor yang disediakan	3 Paket	550.000.000,00
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	397.611.800,00
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	270.000.000,00
5	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Bahan/Material yang disediakan	2 Paket	71.433.744,00
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	100 Laporan	640.999.686,00
7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip pada unit pencipta dan Pengolahan Arsip (UPPA) dan Arsip	5 Dokumen	374.307.000,00



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
		Pada Unit Kearsipan (UK)		
8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Perangkat Daerah	2 Dokumen	787.310.000,00
I.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen	4.761.321.090,00
1	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	29 Unit	423.533.000,00
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor	82 Unit	4.337.788.090,00
I.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	4.086.335.899,00
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Laporan	2.346.900.000,00
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa tenaga pendukung Non PNS	12 Laporan	1.739.435.899,00
I.8	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah	100 Persen	6.532.730.940,00
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit	143.970.120,00
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	150.242.620,00



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
	Operasional atau Lapangan			
3	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	6 Unit	35.000.000,00
4	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	6 Unit	4.242.506.340,00
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	10 Unit	1.961.011.860,00
II	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan pada sasaran daerah	100 Persen	4.398.376.564,00
II.1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	103 Dokumen	1.976.687.064,00
		Jumlah Pendampingan Perencanaan	59 Lembaga/ OPD	
		Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik	2 kali	
		Jumlah Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2 Kali	
		Jumlah Pelaksanaan Musrenbang	2 Kali	
1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 Dokumen	364.777.000,00



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Dokumen	525.233.668,00
3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	90.000.000,00
4	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	72 Berita Acara	70.801.000,00
5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	228.720.000,00
6	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	20 Usulan	19.985.096,00
7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	677.170.300,00
II.2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	5 Dokumen	1.367.433.500,00
		Jumlah Pendampingan Ketersediaan Data	32 Urusan	
		Jumlah Layanan Data dan Informasi Kecamatan	20 Layanan Data dan Informasi	
		Jumlah Rancangan Regulasi Daerah	0 Rancangan Regulasi	



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
		Jumlah Personil Pembinaan Data	177 Orang	
1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	3 Dokumen	661.486.500,00
2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	177 Orang	443.727.000,00
3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	2 Buku	262.220.000,00
II.3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	7 Dokumen	1.054.256.000,00
1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	2 Laporan	368.600.000,00
2	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	5 Laporan	685.656.000,00
III	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan bidang perencanaan Sosial Budaya dan	100 Persen	5.604.120.870,00



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
		Pemerintahan pada Renja-PD		
		Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Renja-PD	100 Persen	
		Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan Bidang Bidang Sarana dan Prasarana Pengembangan Wilayah pada Renja-PD	100 Persen	
III. 1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	77 Dokumen	1.161.005.340,00
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	11 Dokumen	110.632.000,00
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	11 Laporan	76.892.570,00
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	11 Laporan	85.908.840,00



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
	Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		
4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	3 Laporan	223.060.770,00
5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	13 Dokumen	81.408.640,00
6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	13 Laporan	76.706.180,00
7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	13 Laporan	63.408.840,00
8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	Jumlah dokumen Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan	2 Laporan	442.987.500,00



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
	Pembangunan Manusia	Daerah Bidang Pembangunan Manusia		
III. 2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	40 Dokumen	2.889.144.300,00
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen	100.518.000,00
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	6 Laporan	88.328.450,00
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	6 Laporan	64.658.000,00
4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	4 Laporan	1.603.830.200,00
5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen Koordinasi Penyusunan Dokumen	5 Dokumen	111.180.000,00



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
	Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5 Laporan	88.527.750,00
7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5 Laporan	53.586.000,00
8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	3 Laporan	778.515.900,00
III. 3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	8 Dokumen	1.553.971.230,00
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	125.584.150,00
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	1 Laporan	93.367.540,00



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
		Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	59.830.440,00
4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	428.551.800,00
5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	111.939.440,00
6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	92.917.420,00
7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	46.731.440,00
8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan	Jumlah dokumen Koordinasi Pelaksanaan	1 Laporan	595.049.000,00



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
	Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan		
TOTAL				46.601.291.935,0 0

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran dan Anggaran KAS Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025

Melalui matriks program dan kegiatan di atas, terlihat jelas benang merah (korelasi logis) antara formulasi strategi pimpinan dengan eksekusi di tingkat teknis. Bappeda memastikan bahwa seluruh kapasitas sumber daya organisasi terkonsolidasi dengan efisien untuk satu tujuan fundamental menghadirkan perencanaan pembangunan yang presisi, inklusif, dan memberikan dampak (*impact*) yang terukur bagi kemajuan Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja merupakan jantung dari reformasi birokrasi. Dalam paradigma pemerintahan modern, akuntabilitas tidak lagi dimaknai sebatas kemampuan menyajikan laporan keuangan yang tertib administrasi, melainkan kewajiban moral dan profesional untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil (*outcome*) yang berdampak bagi masyarakat.

Secara yuridis, landasan operasional pelaporan ini berpijak pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Regulasi tersebut mendefinisikan akuntabilitas kinerja sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepadanya, berdasarkan perencanaan strategis yang terukur.

Bagi Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 ini adalah instrumen transparansi untuk menjawab amanat publik tersebut. Pengukuran capaian kinerja organisasi dilakukan dengan membandingkan antara Realisasi Kinerja yang dicapai sepanjang tahun 2025 terhadap Target Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Selain itu, untuk melihat tren progresivitas organisasi, dilakukan pula komparasi (*benchmarking*) antara capaian tahun berjalan dengan capaian tahun sebelumnya.

3.1.1 Skala Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja dalam paradigma manajemen pemerintahan modern bukan sekadar kewajiban administratif untuk melaporkan serapan anggaran, melainkan sebuah manifestasi tanggung jawab moral dan profesional instansi pemerintah atas mandat yang diemban. Melalui Laporan Kinerja ini, Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara menyajikan potret objektif mengenai keberhasilan maupun kegagalan pencapaian visi dan misi organisasi secara transparan kepada publik.

Kerangka pengukuran kinerja yang digunakan berpedoman pada prinsip-prinsip Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan petunjuk teknis Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014. Evaluasi dilakukan dengan menyandingkan Realisasi Kinerja yang dicapai sepanjang tahun 2025 terhadap Target Kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, serta dokumen perencanaan strategis jangka menengah (Renstra 2021-2026).

Secara metodologis, pengukuran tingkat capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan melalui mekanisme komparasi persentase realisasi terhadap target. Hasil perhitungan tersebut kemudian dikonversikan ke dalam skala ordinal untuk menentukan gradasi predikat kinerja. Pengelompokan ini bertujuan untuk mempermudah pemetaan posisi kinerja organisasi, apakah berada pada zona optimal atau memerlukan intervensi perbaikan.

Adapun interval kategori penilaian yang digunakan dalam laporan ini mengacu pada standar evaluasi sebagai berikut:

Tabel 3.1 Kategori Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata% Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Skala pengukuran di atas menjadi instrumen evaluasi utama dalam bab ini. Setiap angka capaian indikator tidak hanya berhenti pada pemeringkatan statistik, tetapi ditindaklanjuti dengan analisis kausalitas untuk mengidentifikasi faktor determinan keberhasilan (*key success factors*) maupun akar masalah (*root causes*) kegagalan. Pendekatan ini dimaksudkan agar rekomendasi yang dihasilkan dapat memberikan daya ungkit perbaikan kinerja yang konkret di masa mendatang.

3.1.2 Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun Pelaporan

Melalui laporan ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Kartanegara menyajikan evaluasi komprehensif mengenai tingkat pencapaian kinerja, baik pada level Indikator tujuan maupun Indikator sasaran. Evaluasi ini merupakan manifestasi akuntabilitas atas target-target strategis yang telah dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Sejalan dengan prinsip manajemen kinerja, pengukuran ini tidak hanya bertujuan untuk meninjau keterlaksanaan program secara administratif, melainkan untuk mengukur sejauh mana sasaran strategis tersebut berkontribusi nyata dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dalam kerangka penguatan akuntabilitas instansi pemerintah, penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) menjadi prasyarat mutlak. IKU berfungsi sebagai ukuran keberhasilan (*measure of success*) yang merepresentasikan pencapaian tujuan dan sasaran Strategis organisasi. Oleh karena itu, Bappeda menempatkan pengukuran IKU sebagai instrumen utama untuk memvalidasi keberhasilan kinerja instansi secara objektif dan terukur.

Sebagai upaya konkret dalam menjamin transparansi kinerja, Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara telah melaksanakan pengukuran realisasi kinerja secara berkala sepanjang periode pelaporan. Berdasarkan hasil pengukuran per 31 Desember 2025, rekapitulasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda disajikan dalam tabel berikut:



Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2025

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN%	KATEGORI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Meningkatnya Kinerja Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan	Rata-rata capaian indikator tujuan	90	93,57	103,97	Sangat Tinggi	Dari Badan Pusat Statistik dan perangkat daerah**
II	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan pengendalian Pembangunan Daerah	Skor Penilaian Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah	2,50	3,37	134,8	Sangat Tinggi	Hasil evaluasi terhadap dokumen penilaian PPD oleh Bappeda Provinsi Kalimantan Timur , Namun Pelaksanaan Penilaian PPD Tahun 2025 tidak dilaksanakan sehingga pelaksanaan penilaian PPD terakhir adalah pada Tahun 2024 hal ini sesuai dengan arahan dari pusat bahwa dalam rangka efisiensi dan rasionalisasi terhadap kegiatan seperti perjalanan dinas, rapat -rapat koordinasi, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di hotel.
		Rata-rata capaian indikator sasaran daerah	96,5	97,81	101,36	Sangat Tinggi	Dari Badan Pusat Statistik dan perangkat daerah**

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, 2025

**Data Sementara

Berdasarkan data kuantitatif yang tersaji pada tabel di atas, kinerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 menunjukkan capaian yang optimal. Seluruh indikator kinerja utama berhasil melampaui target yang ditetapkan, yang merefleksikan efektivitas strategi organisasi dalam menjawab isu pembangunan daerah.

Pada level dampak (*Impact*), indikator “Rata-rata Capaian Indikator Tujuan Daerah” mencatatkan realisasi sebesar 93,57%. Angka ini melampaui target perencanaan sebesar 90,00%, dengan tingkat capaian kinerja mencapai 103,97%. Berdasarkan skala pengukuran kinerja, capaian ini berada pada kategori “Sangat Tinggi”, yang mengindikasikan bahwa kualitas perencanaan Bappeda memiliki relevansi kuat terhadap pencapaian visi dan misi jangka menengah daerah.

Kinerja positif juga terlihat pada level hasil (*Outcome*), khususnya pada aspek kualitas teknokratis. Indikator “Skor Penilaian Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD)” berhasil direalisasikan sebesar 3,37 dari target moderat 2,50. Dengan persentase capaian sebesar 134,8%, indikator ini secara absolut masuk dalam kualifikasi “Sangat Tinggi”. Perlu menjadi catatan strategis bahwa pada tahun 2025, pelaksanaan penilaian PPD secara nasional ditiadakan (*moratorium*) sehingga data realisasi yang digunakan masih berdasarkan realisasi tahun 2024.

Kebijakan ini merupakan tindak lanjut atas arahan pemerintah pusat terkait efisiensi dan rasionalisasi anggaran kegiatan, seperti perjalanan dinas dan rapat koordinasi. Meskipun demikian, Bappeda Kutai Kartanegara terbukti mampu mereplikasi dan mempertahankan skor capaian tertinggi terakhirnya, yang membuktikan bahwa substansi dokumen perencanaan daerah tetap terjaga kualitasnya secara konsisten sesuai dengan standar nasional.

Sejalan dengan aspek kualitas dokumen, fungsi pengendalian pembangunan juga berjalan efektif. Indikator “Rata-Rata Capaian Indikator Sasaran Daerah” tercapai sebesar 97,81%, melampaui target 96,50%. Capaian kinerja sebesar 101,36% (Kategori “Sangat Tinggi”) ini menegaskan efektivitas peran Bappeda dalam mengawal kinerja Perangkat Daerah agar tetap selaras dengan target pembangunan (*on-track*).

Secara keseluruhan, pencapaian predikat 'Sangat Tinggi' pada seluruh indikator kinerja utama ini menunjukkan bahwa Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara telah berhasil menjaga keseimbangan yang solid antara kualitas perencanaan teknokratis dengan efektivitas orkestrasi pengendalian di lapangan.

3.1.3 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja

Evaluasi kinerja yang komprehensif membutuhkan tolok ukur yang dinamis. Perbandingan capaian kinerja secara *Year-over-Year* (YoY) antara tahun anggaran berjalan (2025) dengan tahun sebelumnya (2024) serta tinjauan tren historisnya menjadi instrumen esensial untuk mengidentifikasi arah pertumbuhan, stabilitas organisasi, dan area strategis yang memerlukan intervensi lanjutan. Analisis ini memberikan gambaran riil mengenai kapasitas Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mempertahankan eksistensi dan meningkatkan kualitas pelayanannya di tengah dinamika pembangunan daerah.

Rincian komparasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam kurun waktu empat tahun terakhir disajikan secara komprehensif pada matriks berikut:



Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 dan 2025

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2022	2023	2024	2025		
			REALISASI	REALISASI	REALISASI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN%
1	2	3	5	6	7	8	9	10
I	Meningkatnya Kinerja Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan	Rata-rata capaian indikator tujuan	116,84	95,96	97,01	90	93,57	103,97
II	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan pengendalian Pembangunan Daerah	Skor Penilaian Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah	2,07	2,8	3,37	2,50	3,37	134,8
		Rata-rata capaian indikator sasaran daerah	94,2	96,09	97,34	96,50	97,81	101,36

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, 2025

Menyikapi dinamika data pada matriks *time series* di atas, potret kinerja Bappeda secara umum menunjukkan tingkat stabilitas dan resiliensi yang sangat positif. Analisis perbandingan kinerja ini dapat dibedah melalui dua dimensi utama, yakni dimensi dampak makro dan dimensi efektivitas operasional.

Pada tataran dampak makro (*Impact*), indikator "Rata-rata Capaian Indikator Tujuan Daerah" mencatatkan realisasi sebesar 93,57% pada tahun 2025. Terdapat sedikit kontraksi angka jika disandingkan dengan capaian tahun 2024 yang menyentuh angka 97,01%. Namun, fluktuasi minor pada level makro ini merupakan dinamika yang rasional, mengingat agregasi pencapaian tujuan daerah dipengaruhi oleh ekosistem pembangunan multisektoral. Hal yang patut digarisbawahi adalah, di tengah kontraksi tersebut, realisasi kinerja Bappeda tetap berdiri kokoh pada kategori "Sangat Tinggi" dan secara konsisten melampaui target perencanaan awal yang dipatok sebesar 90,00%.

Beralih pada tataran hasil (*Outcome*), kualitas teknokratis perencanaan daerah terbukti sangat persisten. Indikator "Skor Penilaian Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD)" berhasil dipertahankan pada angka absolut 3,37 di tahun 2025, sama kuatnya dengan capaian di tahun 2024. Sebagaimana telah diuraikan pada subbab sebelumnya, meskipun pada tahun 2025 terdapat kebijakan rasionalisasi (moratorium) penilaian PPD secara nasional, retensi capaian skor tertinggi ini merupakan indikasi mutlak bahwa standar ekselensi dokumen perencanaan di Kabupaten Kutai Kartanegara bukanlah sebuah prestasi yang bersifat insidental. Kualitas tersebut telah terinstitusionalisasi menjadi standar operasional baku (*business as usual*) di lingkungan Bappeda.

Tren peningkatan yang paling solid terlihat pada fungsi orkestrasi dan pengendalian. Indikator "Rata-rata Capaian Indikator Sasaran Daerah" mengalami eskalasi berkelanjutan; bergerak dari 96,09% (2023), naik ke 97,34% (2024), dan kembali memuncak pada 97,81% di tahun 2025. Kenaikan yang sangat konsisten ini merepresentasikan tingkat kematangan (*maturity level*) Bappeda dalam menjalankan peran pengawasan, memastikan komitmen kinerja seluruh Perangkat Daerah (OPD) bergerak linier dan adaptif menuju pencapaian target pembangunan.

Secara keseluruhan, komparasi kinerja antara tahun 2024 dan 2025—beserta rekam jejak historisnya—mengonfirmasi bahwa Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara berada pada trajektori yang progresif. Organisasi tidak hanya terbukti

sanggup mempertahankan predikat "Sangat Tinggi" pada seluruh indikator utamanya, tetapi juga menunjukkan kedewasaan manajerial dalam mengawal kualitas perencanaan secara konsisten dan berkelanjutan.

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Anggaran dengan Target Jangka Menengah

Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan yang memuat proyeksi pencapaian visi organisasi. Analisis pada subbab ini bertujuan untuk mengukur tingkat kemajuan (*progress rate*) realisasi kinerja tahun 2025 terhadap target akhir periode Renstra yang ditetapkan untuk tahun 2026. Evaluasi ini penting untuk memetakan apakah organisasi berada pada jalur yang tepat (*on-track*), mengalami keterlambatan (*lagging*), atau justru mampu mengakselerasi pencapaian target lebih cepat dari waktu yang ditentukan.

Berdasarkan hasil evaluasi, tingkat kemajuan kinerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan capaian yang sangat progresif. Rincian perbandingan capaian kinerja terhadap target jangka menengah disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.4 Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

NO.	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2025	TARGET AKHIR 2026	TINGKAT KEMAJUAN
1	2	3	4	5	6=4/5*100
I	Meningkatnya Kinerja Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan	Rata-rata capaian indikator tujuan daerah	93,57	93	100,61
II	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan pengendalian Pembangunan Daerah	Skor Penilaian Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah	3,37	2,6	129,62
		Rata-rata capaian indikator sasaran daerah	97,81	97	100,84

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, 2025

Merujuk pada konstelasi data di atas, dapat ditarik konklusif bahwa secara agregat, Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara telah berhasil merealisasikan target kinerja jangka menengah satu tahun lebih cepat dari proyeksi awal. Seluruh indikator kinerja utama (IKU) pada tahun 2025 telah melampaui angka target akhir tahun 2026.

Berikut adalah analisis terhadap akselerasi kinerja tersebut:

1. **Efektivitas Dampak (Capaian Tujuan Daerah)** Pada tataran dampak (*impact*), indikator "Rata-rata capaian indikator tujuan daerah" mencatatkan tingkat kemajuan sebesar 100,61%. Realisasi 93,57% di tahun 2025 terbukti telah melewati target akhir tahun 2026 yang ditetapkan sebesar 93,00%.
2. **Peningkatan Kualitas Perencanaan (Skor PPD)** Indikator "Skor Penilaian Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah" mencatatkan tingkat kemajuan tertinggi, yakni mencapai 129,62%. Walaupun capaian realisasi didapat pada tahun 2024 sebesar 3,37 telah melampaui target akhir Renstra tahun 2026 yang diproyeksikan pada angka 2,60. Hal ini mengindikasikan bahwa kapasitas teknokratis dan inovasi perencanaan daerah telah mengalami peningkatan kualitas yang signifikan dan melampaui ekspektasi jangka menengah organisasi.
3. **Konsistensi Pengendalian (Capaian Sasaran Daerah)** Indikator "Rata-rata capaian indikator sasaran daerah" juga telah melampaui target akhir periode Renstra. Dengan realisasi sebesar 97,81% di tahun 2025, indikator ini mencatatkan tingkat kemajuan sebesar 100,84% dari proyeksi akhir tahun 2026 yang ditetapkan pada angka 97,00%. Pencapaian ini merepresentasikan konsistensi Bappeda dalam menjalankan fungsi orkestrasi dan pengendalian pembangunan secara konsisten.

Capaian yang melampaui 100% pada seluruh indikator ini menegaskan bahwa Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki ritme kerja yang sangat efektif. Tantangan strategis untuk tahun 2026 mendatang bergeser dari sekadar upaya pencapaian target, menjadi fokus pada upaya mempertahankan standar kinerja (*maintaining standards*) dan memastikan keberlanjutan kualitas tata kelola perencanaan tersebut.

3.1.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Anggaran dengan Standar Nasional dan Provinsi

Dalam ekosistem tata kelola pemerintahan yang terintegrasi, pengukuran kinerja sebuah instansi di tingkat kabupaten tidak berdiri di ruang hampa, melainkan menjadi bagian dari konstelasi pembangunan regional dan nasional. Oleh karena itu, komparasi capaian kinerja antara tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional menjadi instrumen evaluasi (*benchmarking*) yang strategis. Tujuannya bukan sekadar mengukur daya saing kompetitif, melainkan untuk memastikan adanya keselarasan vertikal (*vertical alignment*) dalam penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan.

Berdasarkan arsitektur kinerja yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan indikator kinerja yang secara spesifik mengukur efektivitas perencanaan dan pengendalian di wilayah yurisdiksinya. Jika disandingkan secara literal dengan indikator kinerja pada tingkat Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun tingkat Nasional, memang tidak terdapat nomenklatur indikator yang identik secara persis.

Diferensiasi indikator ini bukanlah indikasi dari ketidaksinkronan, melainkan wujud implementasi logis dari prinsip pembagian kewenangan (*division of authority*) dan penjabaran kinerja (*cascading*). Pada tingkat nasional, indikator berfokus pada agregasi kebijakan makro; tingkat provinsi beroperasi pada ranah koordinasi lintas wilayah; sementara Bappeda tingkat kabupaten berfokus pada operasionalisasi, inovasi dokumen perencanaan, dan efektivitas pengendalian sasaran daerah secara langsung.

Meskipun secara teknis formulasi indikatornya berbeda sesuai dengan lokus kewenangannya masing-masing, benang merah substansi urusan pemerintahan di bidang perencanaan tetap terhubung secara logis. Untuk memetakan hierarki dan keselarasan sasaran kinerja pada ketiga level pemerintahan tersebut, rincian informasinya disajikan dalam matriks berikut:



Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Anggaran dengan Standar Nasional dan Provinsi

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2025	TARGET NASIONAL/ PROVINSI/ KABUPATEN	CAPAIAN%
1	2	3	4	5	6
TINGKAT NASIONAL (BAPPENAS)*					
I	Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia				
I	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional. 1. Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat 2. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pusat 3. Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah	98,82	95	104,02
II	Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional	Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional 1. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat 2. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah	99,67	96-100	99,67
II	Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan				
I	Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner	Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L	99,83	97-100	99,83



NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2025	TARGET NASIONAL/ PROVINSI/ KABUPATEN	CAPAIAN%
1	2	3	4	5	6
		Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L	99,71	95-100	99,71
III	Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien				
I	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas	91,78	88	104,29
		Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder</i>) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional	97,03	95	102,14
		Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional	100,94	95	106,25
TINGKAT PROVINSI (BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR)*					
I	Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	90,33	92,50	97,65
I.1	Meningkatnya Kinerja Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi antara Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Perangkat Daerah	100	94	106,38
		Persentase Keselarasan antara dokumen rencana pembangunan Kabupaten/Kota dengan dokumen rencana pembangunan Provinsi	100	93	107,53



NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2025	TARGET NASIONAL/ PROVINSI/ KABUPATEN	CAPAIAN%
1	2	3	4	5	6
		Persentase Program Prioritas Pembangunan yang Mencapai Target	85	85	100
II	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan Yang Akuntabel dan Memiliki Pelayan Publik Berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Poin)	77,89	79,30	98,22
		Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah (Indeks)	86,23	85,50	100,85
II.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan layanan publik perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Poin)	80,95	80	101,19
		Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah (Indeks)	84,12	85,50	98,39
TINGKAT KABUPATEN (BAPPEDA KAB. KUTAI KARTANEGARA)					
I	Meningkatnya Kinerja Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan	Rata-rata capaian indikator tujuan daerah	93,57	90	103,97
II	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan pengendalian Pembangunan Daerah	Skor Penilaian Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah	3,37	2,50	134,8
		Rata-rata capaian indikator sasaran daerah	97,81	96,50	98,66

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, 2025

*Data capaian 2024

Membedah konstelasi data pada matriks komparasi di atas, terlihat jelas adanya korelasi positif dan trajektori kinerja yang linier di antara ketiga hierarki pemerintahan. Pada tingkat Nasional, tingkat capaian kinerja secara agregat telah menembus proyeksi ekspektasi, khususnya pada aspek sinergi perencanaan, efektivitas pengendalian, serta inovasi pembangunan. Pola eksekusi yang selaras ini juga berhasil direplikasi pada tingkat Provinsi Kalimantan Timur, di mana indikator keselarasan rencana pembangunan kabupaten/kota dengan provinsi mencatatkan capaian optimal hingga 107,53%.

Dalam kerangka keselarasan inilah, dapat dipahami bahwa postur kinerja yang dibangun oleh Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara telah berada pada jalur trajektori yang presisi. Kinerja predikat "Sangat Tinggi" yang direalisasikan di tingkat kabupaten pada tahun 2025 secara esensial bukan hanya pencapaian target administratif secara lokal, melainkan berfungsi sebagai daya ungkit (*leverage*) fundamental. Akselerasi kinerja dari Kabupaten Kutai Kartanegara inilah yang menyumbangkan proporsi agregat bagi pencapaian target pembangunan Provinsi Kalimantan Timur, yang pada gilirannya mengukuhkan pilar keberhasilan sasaran pembangunan nasional secara holistik.

3.1.6 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi yang Dilakukan

Pengukuran dan pelaporan angka capaian kinerja sejatinya baru menuntaskan separuh dari siklus akuntabilitas. Esensi paripurna dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terletak pada kemampuan organisasi untuk melakukan evaluasi kausalitas yang mendalam membedah "mengapa" sebuah target dapat tercapai melampaui ekspektasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat apa saja yang masih menjadi tantangan di lapangan. Analisis determinan ini krusial sebagai fondasi pembelajaran organisasi (*organizational learning*) agar keberhasilan yang diraih dapat dilembagakan secara berkelanjutan, sekaligus memitigasi risiko di masa mendatang.

Secara agregat, seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2025 mulai dari Rata-rata Capaian Tujuan Daerah, Skor PPD, hingga Rata-rata Capaian Sasaran Daerah berhasil menembus predikat "Sangat Tinggi". Oleh karena itu, fokus analisis pada subbab ini diarahkan pada pemetaan faktor penguat keberhasilan (*key success factors*), yang



disandingkan dengan identifikasi hambatan eksternal (analisis kegagalan) serta rumusan solusi strategisnya.

Rincian pemetaan determinan kinerja tersebut diuraikan secara komprehensif dalam matriks berikut:



Tabel 3.6 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi yang Dilakukan

NO.	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN%	ANALISIS KEBERHASILAN	ANALISIS KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Meningkatnya Kinerja Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan	Rata-rata capaian indikator tujuan daerah	90	93,57	103,97	Adanya Kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat. Sinergi antara berbagai pihak dapat mempercepat pencapaian target tujuan daerah yang telah ditetapkan.	Keterbatasan kewenangan, terkait dengan regulasi pelaksanaan Program dalam pencapaian Tujuan, sehingga diperlukan dukungan dari Pemerintah Provinsi dan Pusat.	1. Melakukan Koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat, terkait pembagian tugas dan fungsi berdasarkan kewenangan dalam rangka pencapaian tujuan daerah dengan lebih intens. 2. Memperkuat Kolaborasi antara Pemerintah daerah, Sektor swasta, Pemerintah Provinsi, dan Perguruan Tinggi.
II	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan pengendalian Pembangunan Daerah	Skor Penilaian Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah	2,50	3,37	134,8	1. Pemanfaatan teknologi informasi dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan yang efisien dan akurat. 2. Adanya koordinasi yang baik antar unit kerja di Bappeda, antar Perangkat Daerah teknis terkait dalam penyiapan Dokumen Inovasi	Score Penilaian Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Skor Penilaian yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten dalam rangka Penyusunan Perencanaan secara komprehensif dan terukur dengan kriteria : 1. Aspek Pencapaian Pembangunan (40%) 2. Aspek Kualitas Dokumen Perencanaan	Meskipun Penilaian PPD Tahun 2025 tidak dilaksanakan namun Bappeda tetap melakukan pembinaan kualitas perencanaan Perangkat daerah melalui asistensi dan melakukan review kualitas Renja, indikator, konsistensi program, dan keterkaitan dengan RPJMD.



NO.	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN%	ANALISIS KEBERHASILAN	ANALISIS KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Daerah,karena Dokumen Inovasi yang juga menjadi syarat dan point penilaian.	(40%) 3. Aspek Inovasi (20%) Pelaksanaan Penilaian PPD Tahun 2025 tidak dilaksanakan sehingga pelaksanaan penilaian PPD terakhir adalah pada Tahun 2024 hal ini sesuai dengan arahan dari pusat bahwa dalam rangka efisiensi dan rasionalisasi terhadap kegiatan seperti perjalanan dinas, rapat - rapat koordinasi, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di hotel.	
		Rata-rata capaian indikator sasaran daerah	96,50	97,81	101,36	Komitmen dari Kepala Perangkat Daerah dalam pencapaian Target Sasaran Daerah yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja	Faktor eksternal seperti perubahan kebijakan pemerintah pusat dapat memengaruhi capaian indikator	Memperkuat Kolaborasi dan Sinergitas dengan instansi/lembaga terkait langsung dengan indikator sasaran.

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, 2025

Merujuk pada telaah matriks di atas, performa gemilang Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara tidak lahir dari proses yang parsial. Keberhasilan tersebut ditopang oleh tiga determinan utama:

1. **Sinergi dan Kolaborasi Multisektor**

Keberhasilan pencapaian tujuan daerah sangat dipengaruhi oleh kuatnya ekosistem kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat.

2. **Kematangan Transformasi Digital**

Pemanfaatan teknologi informasi (TI) dalam tahapan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan terbukti menciptakan efisiensi proses dan akurasi data. Hal ini didukung oleh koordinasi lintas unit kerja dalam penyiapan dokumen inovasi daerah.

3. **Komitmen Pimpinan Perangkat Daerah**

Terselenggaranya capaian sasaran daerah tidak lepas dari tingginya komitmen Kepala Perangkat Daerah (PD) dalam mengeksekusi target-target yang telah dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja masing-masing instansi.

Analisis Tantangan (Faktor Penghambat/Kegagalan) : Meskipun target kinerja direalisasikan secara maksimal, Bappeda secara objektif mengidentifikasi beberapa faktor limitasi dan dinamika eksternal yang sempat menjadi tantangan (*bottleneck*) sepanjang tahun 2025, antara lain:

1. **Keterbatasan Kewenangan Yurisdiksi**

Dalam upaya pencapaian beberapa indikator tujuan makro, pemerintah kabupaten sering kali dihadapkan pada regulasi atau kewenangan yang berada di ranah Pemerintah Provinsi maupun Pusat.

2. **Dinamika Kebijakan Pusat (Moratorium PPD)**

Faktor eksternal berupa perubahan kebijakan nasional yakni ditiadakannya pelaksanaan penilaian PPD Tahun 2025 dalam rangka efisiensi anggaran pusat menjadi anomali yang sempat memengaruhi trajektori capaian indikator kualitas perencanaan.

Alternatif Solusi dan Strategi Keberlanjutan : Untuk merespons tantangan-tantangan tersebut dan memastikan standar ekselensi tetap terjaga di tahun mendatang, Bappeda memformulasikan langkah-langkah mitigasi dan solusi strategis sebagai berikut :

1. **Intensifikasi Koordinasi Vertikal dan Horizontal**

Mengakselerasi komunikasi dengan pemerintah provinsi dan pusat terkait harmonisasi kewenangan tugas dan fungsi. Di level horizontal, Bappeda akan memperkuat keterlibatan sektor swasta dan perguruan tinggi (akademisi) dalam perumusan kebijakan.

2. **Pembinaan Kualitas Perencanaan Mandiri**

Menghadapi ketiadaan penilaian PPD dari pusat, Bappeda mengambil langkah proaktif untuk tetap melaksanakan fungsi penjaminan mutu (*quality assurance*) secara mandiri. Hal ini diwujudkan melalui asistensi dan reviu internal terhadap kualitas Rencana Kerja (Renja) OPD, konsistensi indikator, serta keterkaitannya dengan RPJMD.

3. **Penguatan Orkestrasi Eksekusi**

Memperkuat sinergitas secara langsung dengan instansi/lembaga teknis pemangku indikator sasaran untuk memastikan tidak ada program yang berjalan secara ego sektoral (*silo mentality*).

Melalui internalisasi faktor keberhasilan dan pelaksanaan solusi mitigasi tersebut, Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara memproyeksikan arsitektur perencanaan pembangunan di tahun berikutnya akan semakin presisi, tangguh terhadap guncangan eksternal, dan berdampak luas bagi kemakmuran masyarakat.

3.1.7 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Akuntabilitas kinerja yang paripurna tidak hanya diukur dari seberapa presisi sebuah target diselesaikan (*doing the right things*), tetapi juga seberapa rasional dan bijak sumber daya finansial diinvestasikan untuk membiayai penyelesaian target tersebut (*doing things right*). Dalam ekosistem manajemen sektor publik modern, prinsip *Value for Money* (ekonomis, efisien, dan efektif) merupakan landasan aksiologis yang tidak dapat ditawar. Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara dituntut untuk mampu menciptakan ruang fiskal yang sehat dengan cara mengeliminasi inefisiensi pada setiap lini kegiatan operasional.

Pengukuran efisiensi ini dilakukan dengan mengkomparasikan persentase capaian kinerja fisik (realisasi target Indikator Kinerja Utama) dengan persentase serapan anggaran (realisasi keuangan). Komparasi ini bertujuan untuk menguji apakah pembiayaan program telah berjalan secara proporsional, atau justru mengindikasikan adanya pemborosan sumber daya (*cost overrun*).



Rincian perbandingan antara pagu alokasi, realisasi keuangan, dan korelasinya dengan capaian kinerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 disajikan secara komprehensif pada matriks berikut:



Tabel 3.7 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN			EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN%	TARGET	REALISASI	CAPAIAN%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Meningkatnya Kinerja Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan	Rata-rata capaian indikator tujuan daerah	90	93,57	103,97	46.601.291.935	37.514.532.145	80,50	23,47
II	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan pengendalian Pembangunan Daerah	Skor Penilaian Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah	2,50	3,37	134,8				
		Rata-rata capaian indikator sasaran daerah	96,50	97,81	101,36				

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, 2025

Membedah konstelasi data pada matriks di atas, postur tata kelola keuangan Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan tingkat efisiensi yang sangat memuaskan. Dari total pagu anggaran sebesar Rp46.601.291.935,-, instansi berhasil merealisasikan penyerapan senilai Rp37.514.532.145,- atau mencapai 80,50%. Menariknya, dengan serapan anggaran di angka 80 an persen tersebut, Bappeda mampu mendorong realisasi seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) menembus batas capaian di atas 100%. Kondisi ini membuahkan persentase efisiensi mutlak sebesar 23,47%.

Korelasi positif yang mencerminkan kedewasaan manajemen anggaran ini dapat dianalisis lebih lanjut melalui dua dimensi utama :

1. Optimalisasi Rasio Biaya dan Hasil (*Cost-Effectiveness*) Sebagaimana telah diuraikan pada subbab sebelumnya, Bappeda berhasil menyapu bersih seluruh target Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan predikat "Sangat Tinggi". Lompatan capaian kinerja (*over-achievement*) ini terbukti tidak diraih melalui penyerapan anggaran yang membengkak hingga batas maksimal pagu. Terdapat disparitas positif antara tingginya realisasi fisik dengan efisiensi realisasi keuangan (23,47%). Hal ini membuktikan bahwa intervensi program yang dirancang memiliki tingkat *cost-effectiveness* yang tinggi; di mana hasil (*outcome*) maksimal mampu didapatkan dengan biaya operasional yang jauh lebih rasional.
2. Kualitas Sisa Anggaran (Efisiensi Mutlak vs. Gagal Laksana) Adanya sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) sebesar kurang lebih 19,50% pada tahun berjalan bukan direpresentasikan sebagai kegagalan penyerapan (*under-spending*) akibat lemahnya eksekusi kegiatan. Sebaliknya, sisa anggaran ini merupakan "Dividen Efisiensi" sebuah penghematan mutlak yang terlahir dari optimalisasi metode kerja. Pemanfaatan teknologi informasi dalam tahapan Musrenbang, rasionalisasi perjalanan dinas, hingga efisiensi pada pos belanja barang habis pakai dan rapat koordinasi, menjadi determinan utama terciptanya penghematan tersebut tanpa sedikit pun mendegradasi kualitas dokumen perencanaan yang dihasilkan.

Melalui analisis komparatif ini, Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara telah berhasil mematahkan paradigma lama birokrasi yang menganggap bahwa "keberhasilan kinerja harus berbanding lurus dengan habisnya anggaran". Organisasi mampu bertransformasi menjadi institusi yang tangkas (*agile*) dan hemat (*lean*), memastikan setiap rupiah dari uang negara yang diamanatkan

benar-benar berwujud menjadi nilai tambah (*public value*) bagi kualitas perencanaan pembangunan daerah.

3.1.8 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara dalam merealisasikan target Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2025 bukanlah sebuah kebetulan empiris, melainkan manifestasi dari desain arsitektur program yang presisi dan eksekusi kegiatan yang berorientasi pada hasil (*result-oriented*). Setelah membedah tingkat efisiensi alokasi sumber daya, tahapan evaluasi bermuara pada identifikasi program dan kegiatan spesifik yang bertindak sebagai mesin penggerak utama (*prime movers*), sekaligus membedah hambatan operasional yang perlu dimitigasi pada tahun berikutnya.

Secara konseptual, tidak ada satupun capaian makro yang berdiri di ruang hampa; seluruhnya ditopang oleh serangkaian intervensi teknis di lapangan. Pemetaan terhadap faktor pendukung, faktor penghambat, serta rekomendasi tindak lanjut dari pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda disajikan secara terperinci dalam matriks berikut :

Tabel 3.8 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			KETERANGAN		REKOMENDASI TINDAK LANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	88,85	77,84	87,61	1. Internalisasi di lingkup Bappeda dalam rangka penentuan target dokumen perencanaan 2. Optimalisasi dan Pemanfaatan aplikasi terintegrasi SIPD kemudian didukung dengan aplikasi pendamping dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan seperti yang ada di aplikasi ERPJMD, EPantau 4. Adanya dukungan pimpinan dalam rangka pelaksanaan pencapaian kinerja program 5. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan program tersebut 6. Ketersediaan anggaran yang cukup untuk mendukung pelaksanaan program	1. Kurangnya sumber daya manusia dari segi kualitas dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan 2. Perubahan kebijakan/regulasi baik di tingkat nasional maupun daerah 3. Pengumpulan Data Capaian Kinerja yang tidak tepat waktu	1. Melakukan peningkatan kompetensi melalui Pendidikan, seminar, pelatihan, workshop 2. Melakukan koordinasi dengan pihak yang berkompeten dalam rangka analisis dan pemahaman regulasi/kebijakan 3. Menunjuk PIC data kinerja pada setiap bidang/bagian yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			KETERANGAN		REKOMENDASI TINDAK LANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.1	Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen				1. Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung terselesaikannya dokumen perencanaan 2. Adanya dukungan pimpinan dalam rangka pelaksanaan pencapaian kinerja kegiatan 3. Ketersediaan anggaran yang cukup untuk mendukung pelaksanaan kegiatan 4. Ketersediaan Sistem Informasi sebagai alat bantu dalam proses Perencanaan	Kurangnya sumber daya manusia dari segi kualitas dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan	Melakukan peningkatan kompetensi melalui Pendidikan, pelatihan ,workshop
				8	8	100			



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			KETERANGAN		REKOMENDASI TINDAK LANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	100	1. Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung terselesaikannya dokumen perencanaan 2. Adanya dukungan pimpinan dalam rangka pelaksanaan pencapaian kinerja Sub Kegiatan 3. Ketersediaan anggaran yang cukup untuk mendukung pelaksanaan kinerja Sub Kegiatan 4. Ketersediaan Sistem Informasi sebagai alat bantu dalam proses Perencanaan	Kurangnya sumber daya manusia dari segi kualitas dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan	Melakukan peningkatan kompetensi melalui Pendidikan, pelatihan ,workshop kegiatan
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen capaian dan ikhtisar realisasi kinerja	Laporan	2	2	100	1. Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung terselesaikannya dokumen perencanaan 2. Adanya dukungan pimpinan dalam rangka pelaksanaan pencapaian kinerja Sub Kegiatan 3. Ketersediaan anggaran yang cukup untuk mendukung pelaksanaan kinerja Sub Kegiatan	Kurangnya sumber daya manusia dari segi kualitas dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan	Melakukan peningkatan kompetensi melalui Pendidikan, pelatihan ,workshop kegiatan



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			KETERANGAN		REKOMENDASI TINDAK LANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							4. Ketersediaan Sistem Informasi sebagai alat bantu dalam proses Perencanaan		
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	100	1. Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung terselesaikannya dokumen perencanaan 2. Adanya dukungan pimpinan dalam rangka pelaksanaan pencapaian kinerja Sub Kegiatan 3. Ketersediaan anggaran yang cukup untuk mendukung pelaksanaan kinerja Sub Kegiatan 4. Ketersediaan Sistem Informasi sebagai alat bantu dalam proses Perencanaan	Kurangnya sumber daya manusia dari segi kualitas dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan	Melakukan peningkatan kompetensi melalui Pendidikan, pelatihan ,workshop



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			KETERANGAN		REKOMENDASI TINDAK LANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara	1	1	100	1. Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung terselesaikannya dokumen perencanaan 2. Adanya dukungan pimpinan dalam rangka pelaksanaan pencapaian kinerja Sub Kegiatan 3. Ketersediaan anggaran yang cukup untuk mendukung pelaksanaan kinerja Sub Kegiatan 4. Ketersediaan Sistem Informasi sebagai alat bantu dalam proses Perencanaan	Kurangnya sumber daya manusia dari segi kualitas dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan	Melakukan peningkatan kompetensi melalui Pendidikan, pelatihan ,workshop
I.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	6	6	100	1. Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung terselesaikannya dokumen keuangan 2. Adanya dukungan pimpinan dalam rangka pelaksanaan pencapaian kinerja kegiatan 3. Ketersediaan anggaran yang cukup untuk mendukung pelaksanaan	Kurangnya sumber daya manusia dari segi kualitas dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan	Melakukan peningkatan kompetensi melalui Pendidikan, pelatihan ,workshop



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			KETERANGAN		REKOMENDASI TINDAK LANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							kegiatan 4. Ketersediaan Sistem Informasi sebagai alat bantu dalam proses Pengelolaan Keuangan		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	Orang/Bulan	3260	3252	99,75	1. Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung terselesaikannya dokumen keuangan 2. Adanya dukungan pimpinan dalam rangka pelaksanaan pencapaian kinerja Subkegiatan 3. Ketersediaan anggaran yang cukup untuk mendukung pelaksanaan Sub kegiatan 4. Ketersediaan Sistem Informasi sebagai alat bantu dalam proses Pengelolaan Keuangan	Kurangnya sumber daya manusia dari segi kualitas dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan	Melakukan peningkatan kompetensi melalui Pendidikan, pelatihan ,workshop
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Laporan	6	6	100	1. Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung terselesaikannya dokumen keuangan 2. Adanya dukungan pimpinan dalam rangka	Kurangnya sumber daya manusia dari segi kualitas dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan	Melakukan peningkatan kompetensi melalui Pendidikan, pelatihan ,workshop



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			KETERANGAN		REKOMENDASI TINDAK LANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ulanan/ Semesteran SKPD	Kuangan Bulanan/Triw ulanan/Seme steran SKPD					pelaksanaan pencapaian kinerja Subkegiatan 3. Ketersediaan anggaran yang cukup untuk mendukung pelaksanaan Sub kegiatan 4. Ketersediaan Sistem Informasi sebagai alat bantu dalam proses Pengelolaan Keuangan		
I.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	100	1. Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung terselesaikannya dokumen BMD 2. Adanya dukungan pimpinan dalam rangka pelaksanaan pencapaian kinerja kegiatan 3. Ketersediaan anggaran yang cukup untuk mendukung pelaksanaan kegiatan 4. Ketersediaan Sistem Informasi sebagai alat bantu dalam proses Pengelolaan BMD	Kurangnya sumber daya manusia dari segi kualitas dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan	Melakukan peningkatan kompetensi melalui Pendidikan, pelatihan ,workshop



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			KETERANGAN		REKOMENDASI TINDAK LANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	100	1. Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung terselesaikannya dokumen BMD 2. Adanya dukungan pimpinan dalam rangka pelaksanaan pencapaian kinerja Sub kegiatan 3. Ketersediaan anggaran yang cukup untuk mendukung pelaksanaan Sub kegiatan 4. Ketersediaan Sistem Informasi sebagai alat bantu dalam proses Pengelolaan BMD	Kurangnya sumber daya manusia dari segi kualitas dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan	Melakukan peningkatan kompetensi melalui Pendidikan, pelatihan ,workshop
2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	3	3	100	1. Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung terselesaikannya dokumen BMD 2. Adanya dukungan pimpinan dalam rangka pelaksanaan pencapaian kinerja Sub kegiatan 3. Ketersediaan anggaran yang cukup untuk mendukung pelaksanaan Sub	Kurangnya sumber daya manusia dari segi kualitas dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan	Melakukan peningkatan kompetensi melalui Pendidikan, pelatihan ,workshop



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			KETERANGAN		REKOMENDASI TINDAK LANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							kegiatan 4. Ketersediaan Sistem Informasi sebagai alat bantu dalam proses Pengelolaan BMD		
I.4	Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	8	8	100	1. Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung terselesaikannya dokumen Kepegawaian 2. Adanya dukungan pimpinan dalam rangka pelaksanaan pencapaian kinerja kegiatan 3. Ketersediaan anggaran yang cukup untuk mendukung pelaksanaan kegiatan 4. Ketersediaan Sistem Informasi sebagai alat bantu dalam proses Pengelolaan Dokumen administrasi Kepegawaian	keterbatasan kapasitas keuangan daerah pada tahun berjalan mengakibatkan dilakukannya penyesuaian dan rasionalisasi belanja secara selektif sehingga yang dilaksanakan hanya kegiatan prioritas	Dalam rangka peningkatan kompetensi ASN maka dilaksanakan dengan metode lain yaitu melalui media digital/ secara daring dengan menggunakan aplikasi zoom dalam bentuk webinar, e-learning
		Jumlah Pakaian	Stel	368	368	100			
		Jumlah ASN	Orang	30	10	33,33			



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			KETERANGAN		REKOMENDASI TINDAK LANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	8	8	100	1. Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung terselesaikannya dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai 2. Adanya dukungan pimpinan dalam rangka pelaksanaan pencapaian kinerja Sub kegiatan 3. Ketersediaan anggaran yang cukup untuk mendukung pelaksanaan Sub kegiatan 4. Ketersediaan Sistem Informasi sebagai alat bantu dalam proses Pengelolaan Dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Kurangnya sumber daya manusia dari segi kualitas dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan	Melakukan peningkatan kompetensi melalui Pendidikan, pelatihan ,workshop
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	30	10	33,33	1. Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan 2. Adanya dukungan pimpinan dalam rangka pelaksanaan pencapaian kinerja Sub kegiatan 3. Ketersediaan anggaran	keterbatasan kapasitas keuangan daerah pada tahun berjalan mengakibatkan dilakukannya penyesuaian dan	Dalam rangka peningkatan kompetensi ASN maka dilaksanakan dengan metode lain yaitu melalui media digital/ secara daring dengan menggunakan



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			KETERANGAN		REKOMENDASI TINDAK LANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							yang cukup untuk mendukung pelaksanaan Sub kegiatan	rasionalisasi belanja secara selektif sehingga yang dilaksanakan hanya kegiatan prioritas	aplikasi zoom, webinar, e-learning
3	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	3	3	100	1. Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung terselesaikannya kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya 2. Adanya dukungan pimpinan dalam rangka pelaksanaan pencapaian kinerja Sub kegiatan 3. Ketersediaan anggaran yang cukup untuk mendukung pelaksanaan Sub kegiatan	Kurangnya sumber daya manusia dari segi kualitas dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan	Melakukan peningkatan kompetensi melalui Pendidikan, pelatihan, workshop



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			KETERANGAN		REKOMENDASI TINDAK LANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	8	8	100,00	1. Ketersediaan SDM yang kompeten di bidang administrasi. 2. Dukungan anggaran operasional yang memadai. 3. Sarana dan prasarana perkantoran yang cukup (komputer, jaringan, peralatan kerja) 4. Pemanfaatan sistem administrasi berbasis digital. 5. Koordinasi dan dukungan pimpinan yang baik.	1. Kurangnya sumber daya manusia dari segi kualitas dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan 2. Keterlambatan atau keterbatasan anggaran. 3. Gangguan jaringan dan kerusakan peralatan kerja. 4. Kurangnya tertib administrasi dan keterlambatan pelaporan. 5. Perubahan regulasi yang memerlukan penyesuaian cepat.	1. Meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan administrasi dan pemanfaatan aplikasi digital. 2. Mengoptimalkan perencanaan dan pengendalian anggaran agar realisasi tepat waktu. 3. Melakukan pemeliharaan rutin sarana dan prasarana perkantoran, termasuk jaringan dan perangkat kerja. 4. Memperkuat tertib administrasi melalui monitoring dan evaluasi berkala. 5. Meningkatkan koordinasi internal serta respons cepat terhadap perubahan regulasi.
1	Penyediaan Peralatan dan	Jumlah jenis Peralatan dan	Paket	1	1	100	1. Meningkatkan produktivitas pegawai	1. Perencanaan kurang Akurat 2. Keterbatasan	1. Melakukan Analisis Kebutuhan yang lebih Akurat.



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			KETERANGAN		REKOMENDASI TINDAK LANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Perlengkapan Kantor	Perlengkapan Kantor yang Disediakan					2. Meningkatkan Kualitas Hasil kerja	Anggaran 3. Keterlambatan Proses Pengadaan	
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis bahan logistik Kantor yang disediakan	Paket	3	3	100	1. Mendukung kelancaran Operasional Harian 2. Meningkatkan Produktivitas Pegawai 3. Pengawasan dan Evaluasi berkala penggunaan logistik	1. Terhambatnya pelayanan 2. Terhambatnya Pelaksanaan rapat/Koordinasi 3. Penggunaan tidak efisien	1. Evaluasi Penggunaan Logistik secara berkala
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	100	1. Ketersediaan Anggaran yang memadai sesuai kebutuhan kegiatan. 2. Perencanaan Kebutuhan Cetak yang Terjadwal, sehingga tidak terjadi permintaan mendadak dalam jumlah besar. 3. Kerja Sama yang Baik dengan Penyedia Jasa Percetakan yang profesional dan tepat waktu. 4. Spesifikasi Teknis yang Jelas (ukuran, bahan, desain) sebelum proses cetak.	1. Permintaan Mendadak di Luar Perencanaan, terutama menjelang kegiatan besar. 2. Keterbatasan Anggaran atau Efisiensi Belanja, sehingga volume cetak dibatasi. 3. Kesalahan Desain atau Revisi Berulang, yang menyebabkan keterlambatan dan	1. Menyusun Perencanaan Kebutuhan Cetak Tahunan dan Triwulanan untuk menghindari permintaan mendadak. 2. Menetapkan Standar Spesifikasi dan Prosedur Persetujuan Desain sebelum dicetak. 3. Meningkatkan Koordinasi dengan Penyedia Jasa agar waktu penyelesaian sesuai jadwal kegiatan. 4. Melakukan Monitoring



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			KETERANGAN		REKOMENDASI TINDAK LANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							5.Koordinasi Internal yang Efektif antar bidang dalam pengajuan permintaan cetakan.	pembengkakan biaya. 4.Keterlambatan Penyedia Jasa, terutama saat volume pekerjaan tinggi. 5.Kenaikan Harga Bahan Cetak, seperti kertas dan tinta.	dan Evaluasi Penggunaan Anggaran secara berkala. 5.Mengoptimalkan Penggunaan Dokumen Digital untuk mengurangi ketergantungan pada cetak fisik.
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	2	100	1.Ketersediaan Anggaran Publikasi yang memadai sesuai rencana kegiatan. 2.Kerja Sama yang Baik dengan Media Cetak dan Online yang memiliki jangkauan luas dan kredibel 3.Konten Informasi yang Relevan dan Aktual terkait program/kegiatan perangkat daerah. 4.Koordinasi Internal yang Efektif dalam penyediaan bahan rilis, dokumentasi, dan data pendukung.	1.Keterbatasan Anggaran, sehingga frekuensi publikasi terbatas. 2.Keterlambatan Penyampaian Bahan Publikasi, menyebabkan informasi tidak tepat waktu. 3.Perubahan Jadwal Kegiatan, sehingga publikasi harus disesuaikan kembali. 4.Persaingan	1.Menyusun Kalender Publikasi Tahunan sesuai agenda kegiatan perangkat daerah. 2.Meningkatkan Koordinasi Internal agar bahan rilis disiapkan tepat waktu dan lengkap. 3.Memperluas Kerja Sama dengan Media Online yang Kredibel untuk menjangkau audiens lebih luas. 4.Melakukan Evaluasi Dampak Publikasi



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			KETERANGAN		REKOMENDASI TINDAK LANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							5. Perkembangan Media Digital yang memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat.	Ruang Pemberitaan, terutama pada media cetak dengan halaman terbatas. 5. Kurangnya Evaluasi Efektivitas Publikasi, sehingga dampak penyebaran informasi belum terukur optimal.	(jangkauan, respons masyarakat, dokumentasi). 5. Mengoptimalkan Media Digital Resmi (website dan media sosial OPD) sebagai pendukung publikasi.
5	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Bahan/Material yang disediakan	Paket	1	1	100	1. Ketersediaan anggaran Sub Kegiatan 2. Analisa Kebutuhan yang tepat guna 3. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penyimpanan Material	1. Keterbatasan Anggaran Sub Kegiatan 2. Kelangkaan item Bahan/material yang di butuhkan	Menyusun analisa dan estimasi kebutuhan
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang	Laporan	100	100	100	1. Rapat dilaksanakan sesuai jadwal dan memiliki agenda yang jelas 2. Ketersediaan Anggaran yang cukup	1. Ketidakhadiran menghambat proses koordinasi 2. Keputusan tidak ditindaklanjuti secara sistematis	Menetapkan jadwal rapat strategis sejak awal tahun agar lebih terencana dan terintegrasi dengan siklus perencanaan



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			KETERANGAN		REKOMENDASI TINDAK LANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		diselenggara kan						sehingga tidak berdampak signifikan terhadap kinerja.	
7	Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip pada unit pencipta dan Pengolahan Arsip (UPPA) dan Arsip Pada Unit Kearsipan (UK)	Dokumen	5	5	100	1. Adanya petugas arsip atau pengelola administrasi yang memahami tata kelola kearsipan. 2. Tersedianya lemari arsip, ruang penyimpanan, serta sistem penyimpanan yang memadai	1. Arsip menumpuk dan tidak tertata secara sistematis. 2. Arsip belum diklasifikasikan dan disimpan sesuai standar	Menyusun atau memperbarui SOP pengelolaan arsip dinamis sesuai regulasi terbaru.
8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah an Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah sistem Pemerintah an Berbasis Elektronik pada Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	100	1. Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung Proses Pelaksanaan Kegiatan 2. Adanya dukungan pimpinan dalam rangka pelaksanaan pencapaian target kinerja Sub kegiatan 3. Ketersediaan anggaran yang cukup untuk mendukung pelaksanaan Sub kegiatan	Kurangnya sumber daya manusia dari segi kualitas dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan	Menyusun analisa dan estimasi kebutuhan



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			KETERANGAN		REKOMENDASI TINDAK LANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen	100	100	100,00	1.Perencanaan kebutuhan barang yang tepat dan berbasis RKBMD. 2. Ketersediaan anggaran sesuai prioritas. 3.Proses pengadaan sesuai regulasi (Perpres PBJ) dan tepat waktu. 4.SDM pengelola barang dan pejabat pengadaan yang kompeten. 5.Dukungan sistem e-purchasing/e-katalog dan aplikasi pengelolaan BMD.	1. Keterlambatan penetapan anggaran atau revisi DPA. 2.Proses pengadaan yang tertunda (gagal tender/e-purchasing tidak tersedia 3. Kenaikan harga pasar yang tidak sesuai HPS. 4. Keterbatasan SDM pengelola barang. 5. Keterlambatan distribusi atau kendala administrasi pencatatan aset.	1.Meningkatkan kualitas perencanaan kebutuhan barang sejak awal tahun. 2.Mempercepat proses pengadaan melalui e-katalog dan monitoring berkala. 3.Melakukan survei harga pasar secara berkala untuk penyusunan HPS yang realistis. 4.Meningkatkan kapasitas pengurus barang melalui bimbingan teknis. 5.Memastikan pencatatan dan pelaporan aset dilakukan tepat waktu dan sesuai ketentuan.



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			KETERANGAN		REKOMENDASI TINDAK LANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Unit	29	29	100	1. Adanya data barang inventaris mebel yang rusak berat atau tidak layak sebagai dasar pengadaan 2. Ketersediaan unit dan Penyedia Barang di Pasaran 3. SDM Pelaku Pengadaan pada OPD	1. Keterbatasan ketersediaan unit di pasaran 2. Inflasi Harga Pasaran 3. Keterlambatan proses pengiriman 4. Keterlambatan proses pengadaan Menghambat proses pemanfaatan	Menyusun analisa dan estimasi kebutuhan
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor	Unit	82	82	100	1. Kebutuhan peralatan diidentifikasi secara akurat sesuai prioritas dan urgensi 2. Dukungan pagu anggaran memungkinkan pengadaan sesuai spesifikasi yang dibutuhkan 3. Spesifikasi teknis yang jelas dan sesuai standar 4. Ketersediaan unit dan Penyedia Barang di Pasaran 5. SDM Pelaku Pengadaan pada OPD	1. Keterbatasan atau rasionalisasi anggaran 2. Perubahan kebutuhan organisasi di tengah tahun 3. Keterbatasan ketersediaan unit di pasaran	Menyusun jadwal pengadaan sejak awal tahun agar tidak menumpuk di akhir tahun anggaran



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			KETERANGAN		REKOMENDASI TINDAK LANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	100,00	1. Perencanaan Anggaran yang memadai 2. Ketersediaan SDM pendukung yang kompeten 3. Koordinasi internal yang baik 4. SOP dan mekanisme kerja yang jelas 5. Komitmen pimpinan dalam memastikan layanan penunjang berjalan optimal.	1. Keterlambatan proses pengadaan/kontrak jasa 2. Kualitas layanan tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak 3. Kurangnya monitoring dan evaluasi berkala	1. Mempersiapkan dokumen pengadaan sebelum tahun berjalan 2. Melaksanakan evaluasi kinerja penyedia jasa minimal per triwulan
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Laporan	12	12	100	1. Keterbatasan atau Efisiensi Anggaran Dapat menyebabkan keterlambatan pembayaran. 2. Gangguan Teknis dari Penyedia Layanan Seperti pemadaman listrik, gangguan jaringan, atau distribusi air 3. Kenaikan Tarif Layanan Yang tidak diikuti penyesuaian anggaran. 4. Kurangnya Sistem Cadangan (Backup System)	1. Keterbatasan atau Efisiensi Anggaran Dapat menyebabkan keterlambatan pembayaran. 2. Gangguan Teknis dari Penyedia Layanan Seperti pemadaman listrik, gangguan jaringan, atau distribusi air. 3. Kenaikan Tarif Layanan Yang tidak	1. Mengoptimalkan perencanaan dan penganggaran berdasarkan kebutuhan riil serta mengantisipasi kenaikan tarif. 2. Melakukan monitoring rutin pemakaian listrik, air, dan internet untuk mencegah pemborosan dan tunggakan. 3. Meningkatkan koordinasi dengan



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			KETERANGAN		REKOMENDASI TINDAK LANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Seperti belum tersedianya jaringan internet alternatif. 5. Volume Pemakaian yang Tidak Terkontrol Menyebabkan pembengkakan biaya.	diikuti penyesuaian anggaran. 4. Kurangnya Sistem Cadangan (Backup System) Seperti belum tersedianya jaringan internet alternatif. 5. Volume Pemakaian yang Tidak Terkontrol Menyebabkan pembengkakan biaya.	penyedia layanan agar gangguan dapat segera ditangani. 4. Melakukan evaluasi berkala sebagai bahan perbaikan dan peningkatan kinerja tahun berikutnya.
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa tenaga pendukung Non PNS	Laporan	12	12	100	1. Pembagian tugas tenaga pelayanan umum sesuai kebutuhan organisasi. 2. Monitoring kinerja tenaga pelayanan umum meningkatkan disiplin dan kualitas layanan. 3. Udaya kerja yang tertib dan saling menghargai antar pegawai dan tenaga jasa	1. Tingginya tingkat pergantian tenaga jasa Menghambat kesinambungan kualitas pelayanan 2. Tingkat disiplin dan kompetensi tenaga jasa Berpengaruh terhadap kualitas kebersihan, keamanan, dan	Melakukan penilaian rutin terhadap kualitas pelayanan sebagai dasar perpanjangan kontrak atau perbaikan layanan.



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			KETERANGAN		REKOMENDASI TINDAK LANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								pelayanan administrasi.	
I.8	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100	80	80,00	1. Tersedianya anggaran pemeliharaan yang memadai dan terencana. 2. Adanya jadwal pemeliharaan rutin (preventive maintenance). 3. SDM/pengelola barang yang memahami pengelolaan dan pencatatan aset. 4. Ketersediaan penyedia jasa pemeliharaan yang responsif dan kompeten. 5. Sistem pencatatan dan pelaporan aset yang tertib dan terintegrasi.	1. keterbatasan kapasitas keuangan daerah yang berdampak pada penyesuaian dan rasionalisasi belanja sehingga yang dilaksanakan hanya kegiatan prioritas 2. Kurangnya manusia dari segi kualitas dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan 3. Keterbatasan atau keterlambatan anggaran pemeliharaan.	1. memprioritaskan pemeliharaan yang bersifat mendesak 2. Meningkatkan monitoring dan evaluasi kondisi barang secara periodik. 3. Melakukan inventarisasi dan penghapusan aset yang sudah tidak layak guna.



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			KETERANGAN		REKOMENDASI TINDAK LANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								3. Usia aset yang sudah tua sehingga biaya pemeliharaan tinggi.	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	21	21	100	1. Dukungan pagu anggaran mencukupi untuk biaya servis rutin, perbaikan, dan pajak kendaraan 2. Jadwal pemeliharaan berkala yang tertib	1. Kurangnya monitoring jadwal pajak dan servis Berpotensi menyebabkan keterlambatan pembayaran pajak atau kerusakan yang tidak terdeteksi 2. Keterlambatan proses administrasi pembayaran menyebabkan denda pajak	Membuat daftar kendaraan lengkap dengan jadwal servis, masa berlaku pajak, dan kondisi kendaraan yang diperbarui secara berkala.
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara	Unit	26	26	100	1. Dukungan pagu anggaran mencukupi untuk biaya servis rutin, perbaikan, dan pajak kendaraan 2. Jadwal pemeliharaan berkala yang tertib	1. Kurangnya monitoring jadwal pajak dan servis Berpotensi menyebabkan keterlambatan pembayaran pajak atau kerusakan	Membuat daftar kendaraan lengkap dengan jadwal servis, masa berlaku pajak, dan kondisi kendaraan yang diperbarui secara berkala.



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			KETERANGAN		REKOMENDASI TINDAK LANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dinas Operasional atau Lapangan	dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya						yang tidak terdeteksi 2. Keterlambatan proses administrasi pembayaran menyebabkan denda pajak	
3	Pemeliharaan n Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	6	0	0	1. Data kondisi dan jumlah mebel memudahkan perencanaan pemeliharaan 2. Penggunaan mebel sesuai peruntukan dan tidak disalahgunakan	keterbatasan kapasitas keuangan daerah yang berdampak pada penyesuaian dan rasionalisasi belanja sehingga yang dilaksanakan hanya kegiatan prioritas	1. Memprioritaskan pemeliharaan yang bersifat mendesak 2. Meningkatkan kesadaran pegawai untuk menjaga dan menggunakan mebel secara bijak 3. Melakukan pendataan kondisi mebel secara berkala untuk menentukan prioritas perbaikan atau penggantian.
4	Pemeliharaan n Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang	Unit	6	6	100	1. Tersedianya dokumen perencanaan, RAB, dan spesifikasi teknis yang sesuai kebutuhan riil bangunan 2. Dukungan pagu anggaran	1. Keterbatasan anggaran atau efisiensi belanja 2. Kerusakan bangunan yang cukup berat	1. Menyusun jadwal pemeliharaan rutin 2. Menentukan prioritas rehabilitasi berdasarkan tingkat urgensi



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			KETERANGAN		REKOMENDASI TINDAK LANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		dipelihara/dir ehabilitasi					memungkinkan pelaksanaan pemeliharaan rutin maupun rehabilitasi secara optimal		
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	10	10	100	1. Ketersediaan Anggaran yang dialokasikan sesuai kebutuhan pemeliharaan rutin dan rehabilitasi. 2. Perencanaan Teknis yang Baik, termasuk identifikasi kerusakan dan skala prioritas. 3. Komitmen Pimpinan dalam menjaga kelayakan dan keselamatan gedung kantor. 4. SDM/Petugas Teknis yang Kompeten dalam pengawasan pekerjaan. 5. Koordinasi yang Efektif dengan Penyedia Jasa/Kontraktor sehingga pekerjaan tepat waktu dan sesuai spesifikasi.	1. Keterbatasan Anggaran, terutama untuk rehabilitasi skala besar. 2. Kerusakan Tidak Terduga, seperti akibat cuaca ekstrem atau usia bangunan. 3. Keterlambatan Proses Pengadaan barang/jasa. 4. Gangguan Operasional Kantor saat pekerjaan berlangsung 5. Kurangnya Pemeliharaan Rutin, sehingga kerusakan menjadi lebih berat.	1. Menetapkan jadwal pemeliharaan rutin sarana dan prasarana untuk mencegah kerusakan berat 2. Menyusun Skala Prioritas Pemeliharaan berdasarkan tingkat urgensi dan risiko keselamatan. 3. Melakukan Inspeksi Berkala untuk mendeteksi kerusakan sejak dini. 4. Mengoptimalkan Perencanaan dan Penganggaran berbasis kebutuhan riil dan data kondisi bangunan. 5. Mempercepat Proses Pengadaan sesuai



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			KETERANGAN		REKOMENDASI TINDAK LANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									ketentuan agar pekerjaan tidak tertunda. 6.Meningkatkan Pengawasan Pekerjaan agar hasil sesuai spesifikasi teknis. 7.Mendorong Pemeliharaan Preventif guna mengurangi biaya rehabilitasi besar di masa mendatang



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			KETERANGAN		REKOMENDASI TINDAK LANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan pada sasaran daerah	Persen	100	83,98	83,98	1. Adanya sistem informasi terkait perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah 2. Adanya Regulasi dalam proses perencanaan, pengendalian evaluasi program prioritas 3. Proses Koordinasi dan sinkronisasi dilakukan sesuai dengan tahapan perencanaan, pengendalian dan evaluasi 4. Adanya dukungan pimpinan dalam rangka pencapaian kinerja program 5. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan program tersebut 6. Ketersediaan anggaran yang cukup untuk mendukung pelaksanaan program	1. Hasil Evaluasi dan Pengendalian belum dipedomani secara optimal 2. Data belum sepenuhnya tersedia oleh produsen data pada awal tahun 3. Proses pengendalian dan evaluasi terhadap program prioritas belum sepenuhnya terbangun dalam skema kerja terintegrasi 4. Terdapat beberapa program yang mengalami rasionalisasi anggaran sehingga intervensi kebijakan tidak berjalan optimal	1. Memperkuat pengendalian dan evaluasi secara berjemjang mulai dari pelaksana kegiatan, pengendali program hingga pengendali tujuan dan sasaran pada masing masing Perangkat Daerah 2. Memperkuat pengendalian dan evaluasi serta penyediaan data sektoral secara berjenjang
II.1	Penyusunan Perencanaan	Jumlah Dokumen	Dokumen	103	103	100	1. Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung	Alokasi dan Kapasitas SDM	1. Peningkatan kualitas SDM



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			KETERANGAN		REKOMENDASI TINDAK LANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dan Pendanaan	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan					pelaksanaan kegiatan 2. Adanya dukungan pimpinan dalam rangka pelaksanaan pencapaian kinerja kegiatan 3. Ketersediaan anggaran yang cukup untuk mendukung pelaksanaan kegiatan 4. Ketersediaan Sistem Informasi sebagai alat bantu dalam proses monitoring dan evaluasi 5. Adanya regulasi dalam pelaksanaan penyediaan dokumen rencana	Keterbatasan pemahaman terhadap data	Perencana 2. Penguatan pola kerja terintegrasi berbasis teknologi informasi. 3. Mengoptimalkan hasil pengendalian dan evaluasi sebagai instrumen perencanaan pembangunan daerah
		Jumlah Pendamping an Perencanaan	Lembaga/ OPD	59	59	100			
		Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik	kali	2	2	100			
		Jumlah Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Linta s Perangkat Daerah	Kali	72	72	100			
		Jumlah Pelaksanaan Musrenbang	Kali	2	2	100			



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			KETERANGAN		REKOMENDASI TINDAK LANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKP D (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen	2	2	100	1. Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan 2. Adanya dukungan pimpinan dalam rangka pelaksanaan pencapaian kinerja Sub kegiatan 3. Ketersediaan anggaran yang cukup untuk mendukung pelaksanaan Sub kegiatan 4. Ketersediaan Sistem Informasi sebagai alat bantu dalam proses monitoring dan evaluasi	Kurangnya sumber daya manusia dari segi kualitas dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan	Melakukan peningkatan kompetensi melalui Pendidikan, seminar, pelatihan, dan workshop



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			KETERANGAN		REKOMENDASI TINDAK LANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	2	2	100	1. Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan 2. Adanya dukungan pimpinan dalam rangka pelaksanaan pencapaian kinerja Sub kegiatan 3. Ketersediaan anggaran yang cukup untuk mendukung pelaksanaan Sub kegiatan 4. Ketersediaan Sistem Informasi sebagai alat bantu dalam proses monitoring dan evaluasi	1. Belum optimalnya penelaahan terhadap RKP nasional karena perubahan kebijakan perencanaan pembangunan 2. kurangnya koordinasi dengan perangkat daerah maupun provinsi karena ketersediaan data yang belum akurat. 3. keterbatasan SDM yang memiliki kompetensi teknis dalam analisis dokumen penelaahan	1. kebijakan perencanaan pembangunan nasional harus tersampaikan dengan jelas terhadap program pembangunan daerah 2. perlunya koordinasi terpadu antar perangkat daerah maupun pemprov terkait persiapan data dan informasi yang matang 3. perlunya sdm yang kompeten dengan kualifikasi teknis yang memadai untuk melakukan analisis dan evaluasi terhadap dokumen penelaahan
3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	2	2	100	1. Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan 2. Adanya dukungan pimpinan dalam rangka	Rendahnya partisipasi masyarakat maupun lembaga/organisas	perlunya partisipasi yang tinggi dari masyarakat, lembaga atau organisasi untuk memberikan masukan



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			KETERANGAN		REKOMENDASI TINDAK LANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							pelaksanaan pencapaian kinerja Sub kegiatan 3. Ketersediaan anggaran yang cukup untuk mendukung pelaksanaan Sub kegiatan 4. Ketersediaan Sistem Informasi sebagai alat bantu dalam proses monitoring dan evaluasi	i untuk hadir dan terlibat dalam forum dialog terkait masukan dan saran.	dan saran terhadap program perencanaan pembangunan daerah
4	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	72	72	100	1. Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan 2. Adanya dukungan pimpinan dalam rangka pelaksanaan pencapaian kinerja Sub kegiatan 3. Ketersediaan anggaran yang cukup untuk mendukung pelaksanaan Sub kegiatan 4. Ketersediaan Sistem Informasi sebagai alat bantu dalam proses monitoring dan evaluasi	kurangnya koordinasi antar perangkat daerah dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi antar opd	perlunya kesiapan antar perangkat daerah untuk meningkatkan koordinasi untuk memastikan program antar perangkat daerah saling mendukung dan tidak tumpang tindih
5	Pelaksanaan Musrenbang	Jumlah Berita Acara	Berita Acara	2	2	100	1. Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung	Rendahnya partisipasi	perlunya partisipasi yang tinggi dari



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			KETERANGAN		REKOMENDASI TINDAK LANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kabupaten/Kota	Musrenbang Kabupaten/Kota					pelaksanaan sub kegiatan 2. Adanya dukungan pimpinan dalam rangka pelaksanaan pencapaian kinerja Sub kegiatan 3. Ketersediaan anggaran yang cukup untuk mendukung pelaksanaan Sub kegiatan 4. Ketersediaan Sistem Informasi sebagai alat bantu dalam proses monitoring dan evaluasi	masyarakat, lembaga dan organisasi untuk hadir dan terlibat dalam musrenbang kabupaten terkait masukan dan saran untuk program pembangunan daerah	masyarakat, lembaga atau organisasi untuk memberikan masukan dan saran terhadap program perencanaan pembangunan daerah dalam musrenbang kabupaten
6	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan	20	20	100	1. Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan 2. Adanya dukungan pimpinan dalam rangka pelaksanaan pencapaian kinerja Sub kegiatan 3. Ketersediaan anggaran yang cukup untuk mendukung pelaksanaan Sub kegiatan 4. Ketersediaan Sistem Informasi sebagai alat bantu	Rendahnya partisipasi masyarakat dan desa untuk hadir dan terlibat dalam forum dialog terkait masukan dan saran.	Perlunya partisipasi yang tinggi dari masyarakat, lembaga atau organisasi untuk memberikan masukan dan saran terhadap program perencanaan pembangunan daerah



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			KETERANGAN		REKOMENDASI TINDAK LANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							dalam proses monitoring dan evaluasi		
7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	3	3	100	1. Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan 2. Adanya dukungan pimpinan dalam rangka pelaksanaan pencapaian kinerja Sub kegiatan 3. Ketersediaan anggaran yang cukup untuk mendukung pelaksanaan Sub kegiatan 4. Ketersediaan Sistem Informasi sebagai alat bantu	1. Perangkat Daerah masih fokus pada program dan target masing-masing. 2. Kurangnya komitmen terhadap prioritas daerah yang bersifat lintas urusan (cross cutting). 3. Belum optimalnya	Mengoptimalkan Koordinasi dengan Perangkat Daerah melalui Forum Perangkat Daerah



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			KETERANGAN		REKOMENDASI TINDAK LANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							dalam proses monitoring dan evaluasi	Koordinasi antar Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian prioritas daerah	
II.2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	Dokumen	5	5	100	1. Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan 2. Adanya dukungan pimpinan dalam rangka pelaksanaan pencapaian kinerja kegiatan 3. Ketersediaan anggaran yang cukup untuk mendukung pelaksanaan kegiatan 4. Ketersediaan Sistem Informasi sebagai alat bantu dalam proses monitoring dan	1. Terbatasnya SDM yang dapat memahami Pengelolaan 2. Dukungan komitmen kecamatan belum optimal karena belum tersedianya regulasi	1. Peningkatan kualitas SDM Perencana 2. Penguatan pola kerja terintegrasi berbasis teknologi informasi. 3. Mengoptimalkan hasil pengendalian dan evaluasi sebagai instrumen perencanaan pembangunan daerah
		Jumlah Pendampingan Ketersediaan Data	Urusan	32	32	100			



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			KETERANGAN		REKOMENDASI TINDAK LANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Layanan Data dan Informasi Kecamatan	Layanan Data dan Informasi	20	20	100	evaluasi 5. Adanya regulasi dalam pelaksanaan penyediaan dokumen rencana		
		Jumlah Rancangan Regulasi Daerah	Rancangan Regulasi	0	0	0			
		Jumlah Personil Pembinaan Data	Orang	177	192	108,47			
1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan	Dokumen	3	3	100	1. Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung terselesainya analisis data dan informasi perencanaan 2. Adanya dukungan pimpinan dalam rangka pelaksanaan pencapaian kinerja Sub kegiatan 3. Ketersediaan anggaran yang cukup untuk mendukung pelaksanaan Sub kegiatan 4. Ketersediaan Sistem	1. Tidak tersedianya pedoman petunjuk teknis pelaksanaan penyediaan data 2. Kurangnya sumber daya manusia dari segi kualitas dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pengeloaan data	1. Menyusun dan menetapkan pedoman petunjuk teknis pelaksanaan penyediaan data 2. Melakukan peningkatan kompetensi melalui pelatihan 3. Penguatan struktur kelembagaan pengelolaan Data



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			KETERANGAN		REKOMENDASI TINDAK LANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pembangunan Daerah)					Informasi sebagai alat bantu dalam proses Pengelolaan Data dan Informasi	3. Kurangnya koordinasi antar instansi	
2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	177	192	108,5	1. Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung terselesainya analisis data dan informasi perencanaan 2. Adanya dukungan pimpinan dalam rangka pelaksanaan pencapaian kinerja Sub kegiatan 3. Ketersediaan anggaran yang cukup untuk mendukung pelaksanaan Sub kegiatan 4. Ketersediaan Sistem Informasi sebagai alat bantu dalam proses Pengelolaan Data dan Informasi	1. Data dan Informasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan berbeda antara yang dilaporkan dengan yang diinput pada aplikasi Becik 2. Kurangnya sumber daya manusia dari segi kualitas dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pengelooan data	1. Melakukan Desk pendampingan dan pembinaan terkait pengelolaan data 2. Melakukan peningkatan kompetensi melalui pelatihan



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			KETERANGAN		REKOMENDASI TINDAK LANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku	2	2	100	1. Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung terselesainya penyusunan dokumen profil pembangunan daerah 2. Adanya dukungan pimpinan dalam rangka pelaksanaan pencapaian kinerja Sub kegiatan 3. Ketersediaan anggaran yang cukup untuk mendukung pelaksanaan Sub kegiatan 4. Ketersediaan Sistem Informasi sebagai alat bantu dalam proses monitoring dan evaluasi	Pengumpulan Data oleh perangkat daerah tidak tepat waktu	Perlunya komitmen oleh Perangkat daerah terkait pengumpulan data yang tepat waktu
II.3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	7	7	100	1. Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan 2. Adanya dukungan pimpinan dalam rangka pelaksanaan pencapaian kinerja kegiatan 3. Ketersediaan anggaran yang cukup untuk	1. Terbatasnya SDM yang dapat memahami Pengelolaan 2. Dukungan komitmen kecamatan belum optimal karena belum tersedianya regulasi	1. Peningkatan kualitas SDM Perencana 2. Penguatan pola kerja terintegrasi berbasis teknologi informasi. 3. Mengoptimalkan hasil pengendalian dan evaluasi sebagai instrumen perencanaan pembangunan daerah



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			KETERANGAN		REKOMENDASI TINDAK LANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							mendukung pelaksanaan kegiatan 4. Ketersediaan Sistem Informasi sebagai alat bantu dalam proses monitoring dan evaluasi 5. Adanya regulasi dalam pelaksanaan penyediaan dokumen rencana		
1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Laporan	2	2	100	1. Adanya Regulasi dalam pelaksanaan Proses Pengendalian Pelaksanaan RKPD. 2. Adanya Sistem informasi pelaksanaan pengendalian dan evaluasi yang terintegrasi berbasis Web	1. Kurangnya Komitmen Kepala Perangkat daerah dalam pelaksanaan proses pengendalian Pelaksanaan RENJA-PD 2. Kurangnya kompetensi SDM / ASN yang spesifik pada fungsi Evaluator.	1. Melakukan Pendampingan kepada perangkat daerah dalam proses pengendalian dan evaluasi. 2. Melaksanakan Workshop dan Bimtek dalam rangka peningkatan Pengetahuan ASN untuk melaksanakan proses Pengendalian dan Evaluasi.



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			KETERANGAN		REKOMENDASI TINDAK LANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Laporan	5	5	100	1. Adanya Regulasi dalam pelaksanaan Proses Pengendalian Pelaksanaan RKPD. 2. Adanya Sistem informasi pelaksanaan pengendalian dan evaluasi yang terintegrasi berbasis Web	1. Kurangnya pemahaman Perangkat daerah untuk melakukan proses pengendalian, monitoring dan evaluasi secara mandiri (self Assesment) 2. Kurangnya kompetensi SDM / ASN yang spesifik pada fungsi Evaluator.	1. Melakukan Pendampingan kepada perangkat daerah dalam proses pengendalian dan evaluasi. 2. Melaksanakan Workshop dan Bimtek dalam rangka peningkatan Pengetahuan ASN untuk melaksanakan proses Pengendalian dan Evaluasi.
III	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan bidang perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan pada Renja-PD	Persen	100	93,73	93,73	1. ketersediaan Sistem Informasi sebagai alat bantu perangkat daerah dalam proses Perencanaan Pengendalian dan evaluasi 2. Ketersediaan anggaran yang cukup untuk mendukung kegiatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi 3. Regulasi sudah cukup jelas mengatur kegiatan	1. Perangkat Daerah masih fokus target sektoral masing-masing sehingga sinergi lintas urusan lemah 2. Perubahan Kebijakan pusat diantaranya penyesuaian TKD yang	1. Permasalahan lemahnya sinergi lintas urusan antar-OPD perlu diselesaikan melalui penguatan pendekatan perencanaan berbasis outcome yang terintegrasi. Selama ini, masing-masing perangkat daerah cenderung berfokus pada pencapaian target



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			KETERANGAN		REKOMENDASI TINDAK LANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							perencanaan, pengendalian dan evaluasi" 4. Adanya dukungan pimpinan dalam rangka pencapaian kinerja program 5. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan program tersebut	mengharuskan efisiensi dilakukan sehingga mengakibatkan target tidak tercapai 3. Monitoring dan evaluasi hanya berfokus pada pelaporan, rekomendasi evaluasi belum jadi dasar perbaikan oleh perangkat daerah	sektoral tanpa memastikan keterkaitannya dengan tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan penetapan indikator kinerja bersama yang menjadi tanggung jawab lintas OPD, sehingga capaian pembangunan tidak lagi berdiri sendiri-sendiri. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat forum koordinasi kinerja secara berkala yang tidak hanya membahas serapan anggaran, tetapi lebih menekankan pada progres pencapaian hasil dan dampak. Selain itu, penyusunan program prioritas daerah yang bersifat integratif dan



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			KETERANGAN		REKOMENDASI TINDAK LANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									melibatkan beberapa OPD sekaligus akan mendorong kolaborasi yang lebih kuat serta mengurangi duplikasi kegiatan. 2. Terkait dengan perubahan kebijakan pusat, khususnya penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) yang menuntut efisiensi anggaran, pemerintah daerah perlu membangun perencanaan yang adaptif dan berbasis skala prioritas. Setiap program dan kegiatan harus diklasifikasikan berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya terhadap masyarakat, sehingga ketika terjadi penyesuaian anggaran, program yang bersifat strategis dan



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			KETERANGAN		REKOMENDASI TINDAK LANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									berdampak langsung tetap dapat dipertahankan 3. Permasalahan monitoring dan evaluasi yang selama ini lebih berorientasi pada pemenuhan kewajiban pelaporan harus diarahkan menjadi instrumen perbaikan kinerja yang nyata. Evaluasi seharusnya tidak berhenti pada penyusunan laporan, tetapi ditindaklanjuti dengan rencana aksi yang jelas, penetapan penanggung jawab, serta batas waktu penyelesaian. Hasil rekomendasi evaluasi perlu dijadikan dasar dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran tahun berikutnya agar terjadi



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			KETERANGAN		REKOMENDASI TINDAK LANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									siklus perbaikan berkelanjutan. Pemanfaatan sistem monitoring berbasis digital juga penting untuk memastikan pengawasan yang lebih transparan dan akuntabel, sekaligus memudahkan pimpinan daerah dalam mengambil keputusan strategis berbasis data.



		Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Renja-PD	Persen	100	80,43	80,43	1. ketersediaan Sistem Informasi sebagai alat bantu perangkat daerah dalam proses Perencanaan Pengendalian dan evaluasi 2. Ketersediaan anggaran yang cukup untuk mendukung kegiatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi 3. Regulasi sudah cukup jelas mengatur kegiatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi" 4. Adanya dukungan pimpinan dalam rangka pencapaian kinerja program 5. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan program tersebut	1. Perangkat Daerah masih fokus target sektoral masing-masing sehingga sinergi lintas urusan lemah 2. Perubahan Kebijakan pusat diantaranya penyesuaian TKD yang mengharuskan efisiensi dilakukan sehingga mengakibatkan target tidak tercapai 3. Monitoring dan evaluasi hanya berfokus pada pelaporan, rekomendasi evaluasi belum jadi dasar perbaikan oleh perangkat daerah	1. Permasalahan lemahnya sinergi lintas urusan antar-OPD perlu diselesaikan melalui penguatan pendekatan perencanaan berbasis outcome yang terintegrasi. Selama ini, masing-masing perangkat daerah cenderung berfokus pada pencapaian target sektoral tanpa memastikan keterkaitannya dengan tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan penetapan indikator kinerja bersama yang menjadi tanggung jawab lintas OPD, sehingga capaian pembangunan tidak lagi berdiri sendiri-sendiri. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat forum koordinasi kinerja secara berkala yang tidak hanya membahas serapan anggaran, tetapi lebih menekankan pada progres pencapaian hasil dan dampak. Selain itu,
--	--	---	---------------	------------	--------------	--------------	--	---	---



									penyusunan program prioritas daerah yang bersifat integratif dan melibatkan beberapa OPD sekaligus akan mendorong kolaborasi yang lebih kuat serta mengurangi duplikasi kegiatan. 2. Terkait dengan perubahan kebijakan pusat, khususnya penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) yang menuntut efisiensi anggaran, pemerintah daerah perlu membangun perencanaan yang adaptif dan berbasis skala prioritas. Setiap program dan kegiatan harus diklasifikasikan berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya terhadap masyarakat, sehingga ketika terjadi penyesuaian anggaran, program yang bersifat strategis dan berdampak langsung tetap dapat dipertahankan 3. Permasalahan monitoring dan evaluasi yang selama ini lebih
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



									berorientasi pada pemenuhan kewajiban pelaporan harus diarahkan menjadi instrumen perbaikan kinerja yang nyata. Evaluasi seharusnya tidak berhenti pada penyusunan laporan, tetapi ditindaklanjuti dengan rencana aksi yang jelas, penetapan penanggung jawab, serta batas waktu penyelesaian. Hasil rekomendasi evaluasi perlu dijadikan dasar dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran tahun berikutnya agar terjadi siklus perbaikan berkelanjutan. Pemanfaatan sistem monitoring berbasis digital juga penting untuk memastikan pengawasan yang lebih transparan dan akuntabel, sekaligus memudahkan pimpinan daerah dalam mengambil keputusan strategis berbasis data.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			KETERANGAN		REKOMENDASI TINDAK LANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan Bidang Bidang Sarana dan Prasarana Pengembangan Wilayah pada Renja-PD	Persen	100	90,61	90,61	1. ketersediaan Sistem Informasi sebagai alat bantu perangkat daerah dalam proses Perencanaan Pengendalian dan evaluasi 2. Ketersediaan anggaran yang cukup untuk mendukung kegiatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi 3. Regulasi sudah cukup jelas mengatur kegiatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi" 4. Adanya dukungan pimpinan dalam rangka pencapaian kinerja program 5. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan program tersebut	1. Perangkat Daerah masih fokus target sektoral masing-masing sehingga sinergi lintas urusan lemah 2. Perubahan Kebijakan pusat diantaranya penyesuaian TKD yang mengharuskan efisiensi dilakukan sehingga mengakibatkan target tidak tercapai 3. Monitoring dan evaluasi hanya berfokus pada pelaporan, rekomendasi evaluasi belum jadi dasar perbaikan oleh perangkat daerah	1. Permasalahan lemahnya sinergi lintas urusan antar-OPD perlu diselesaikan melalui penguatan pendekatan perencanaan berbasis outcome yang terintegrasi. Selama ini, masing-masing perangkat daerah cenderung berfokus pada pencapaian target sektoral tanpa memastikan keterkaitannya dengan tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan penetapan indikator kinerja bersama yang menjadi tanggung jawab lintas OPD, sehingga capaian pembangunan tidak lagi berdiri sendiri-sendiri. Pemerintah daerah juga



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			KETERANGAN		REKOMENDASI TINDAK LANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									perlu memperkuat forum koordinasi kinerja secara berkala yang tidak hanya membahas serapan anggaran, tetapi lebih menekankan pada progres pencapaian hasil dan dampak. Selain itu, penyusunan program prioritas daerah yang bersifat integratif dan melibatkan beberapa OPD sekaligus akan mendorong kolaborasi yang lebih kuat serta mengurangi duplikasi kegiatan. 2. Terkait dengan perubahan kebijakan pusat, khususnya penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) yang menuntut efisiensi anggaran, pemerintah daerah perlu membangun



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			KETERANGAN		REKOMENDASI TINDAK LANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									perencanaan yang adaptif dan berbasis skala prioritas. Setiap program dan kegiatan harus diklasifikasikan berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya terhadap masyarakat, sehingga ketika terjadi penyesuaian anggaran, program yang bersifat strategis dan berdampak langsung tetap dapat dipertahankan 3. Permasalahan monitoring dan evaluasi yang selama ini lebih berorientasi pada pemenuhan kewajiban pelaporan harus diarahkan menjadi instrumen perbaikan kinerja yang nyata. Evaluasi seharusnya tidak berhenti pada penyusunan laporan,



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			KETERANGAN		REKOMENDASI TINDAK LANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									tetapi ditindaklanjuti dengan rencana aksi yang jelas, penetapan penanggung jawab, serta batas waktu penyelesaian. Hasil rekomendasi evaluasi perlu dijadikan dasar dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran tahun berikutnya agar terjadi siklus perbaikan berkelanjutan. Pemanfaatan sistem monitoring berbasis digital juga penting untuk memastikan pengawasan yang lebih transparan dan akuntabel, sekaligus memudahkan pimpinan daerah dalam mengambil keputusan strategis berbasis data.



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			KETERANGAN		REKOMENDASI TINDAK LANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III.1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen	77	77	100	1. Dokumen perencanaan selaras (RPJPD-RPJMD-Renstra-Renja) 2. Forum Koordinasi Rutin & Tematik berjalan dengan baik 3. Pemanfaatan sistem informasi dalam mengendalikan kegiatan 4. Anggaran tersedia sesuai kebutuhan	1. Perangkat daerah fokus target sendiri, kurang mau berkolaborasi 2. Data antar perangkat daerah tidak sinkron 3. Perubahan kebijakan pusat mendadak mengakibatkan rencana daerah terganggu 4. Pemahaman perencanaan berbasis kinerja belum merata	1. Diperlukan koordinasi dan fasilitasi untuk sinkronisasi data antar perangkat bidang perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia 2. Penguatan dan perbaikan sistem informasi sebagai pendukung pengumpulan dan sinkronisasi data perangkat daerah 3. Penguatan SDM evaluator bidang pemerintahan dan pembangunan manusia 4. Percepatan Sosialisasi kebijakan dari pusat
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Dokumen	11	11	100	1. Ketersediaan data sebagai data pendukung perangkat daerah dalam proses Perencanaan Penyusunan Dokumen ini 2. Ketersediaan anggaran	1. Kurangnya data dan informasi dari perangkat daerah yang diberikan sebagai dasar pembuatan	1. Diperlukan Koordinasi dan sinkronisasi data kepada Perangkat Daerah untuk mendukung pembuatan Dokumen tersebut



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			KETERANGAN		REKOMENDASI TINDAK LANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					yang cukup untuk mendukung kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan 3. Kebijakan sudah cukup jelas yang akan mengatur untuk penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pemerintahan 4. Koordinasi dan Dukungan dari Pimpinan untuk membuat suatu dokumen kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan 5. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan program tersebut	dokumen tersebut 2. Kurangnya sinkronisasi antar Perangkat Daerah 3. Kurangnya dana untuk menyusun dokumen tersebut	2. Mengevaluasi setiap data yang diberikan oleh Perangkat Daerah agar sesuai dengan data yang berlaku untuk pendukung dokumen yang diperoleh 3. untuk meningkatkan efisiensi dan konsistensi terutama dalam konteks penganggaran, penatausahaan, hingga pelaksanaan dan evaluasi pembangunan Daerah
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah dokumen Asistensi Penyusunan Dokumen	Laporan	11	11	100	1. Adanya kebijakan (SE) atau surat Keputusan (SK) terkait mekanisme dan waktu untuk penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan	1. Pemahaman dalam penyusunan dokumen perangkat daerah yang tidak sesuai	1. Melaporkan hasil asistensi penyusunan dokumen 2. Membuat dokumentasi, berita



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			KETERANGAN		REKOMENDASI TINDAK LANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	n Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan					Perangkat Daerah 2. Adanya sistem informasi atau Aplikasi untuk menggunggah Data secara Real untuk menghindari data yang hilang 3. tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung proses asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Pemerintahan. 4. Tersedianya anggaran yang mendukung kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan.	dengan SE yang dan Surat Keputusan (SK) mekanisme penyusunan dokumen 2. Kurangnya Pemahaman SDM evaluator terhadap substansi dokumen perencanaan perangkat daerah	acara tentang hasil Verifikasi terhadap dokumen perencanaan perangkat daerah yang dilakukan
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	Jumlah dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Laporan	11	11	100	1. Tersedianya Dukungan Sarana dan prasarana untuk memproses verifikasi 2. Tersedianya sistem informasi/aplikasi Epantau-NG 3. Tersedianya Dokumen dan data pendukung dari	1. Data dan informasi Perangkat Daerah dalam inputing kurang akurat 2. Keterlambatan pelaporan dari Perangkat Daerah	1. Penguatan verifikasi data dan informasi pelaporan Perangkat Daerah 2. Komitmen kepatuhan dan ketepatan waktu input data pelaporan



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			KETERANGAN		REKOMENDASI TINDAK LANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Daerah Bidang Pemerintah n	Pembanguna n Perangkat Daerah Bidang Pemerintah n					Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 4. Tersedianya Jadwal dan rencana untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi		
4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembanguna n Daerah Bidang Pemerintah n	Jumlah dokumen Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembanguna n Daerah Bidang Pemerintah n	Laporan	3	3	100	1. Tersedianya Dukungan Sarana dan prasarana 2. Tersedianya Anggaran dan SDM untuk pelaksanaan Koordinasi Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan 3. Tersedianya Narasumber yang menguasai substansi penyusunan dokumen 4. Tersedianya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan menengah sebagai dasar untuk menentukan arah kebijakan dalam pelaksanaan sinergitas. 5. Tersusunnya output/Dokumen yang di	1. Keterbatasan SDM dalam pelaksanaan Koordinasi Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan 2. Mekanisme birokrasi yang lamban dari perangkat daerah dalam pemenuhan kebutuhan data yang di butuhkan oleh narasumber pada saat penyusunan dokumen	1. Peningkatan Kompetensi SDM dengan memberikan pelatihan teknis terkait pengelolaan dan analisis data kinetja bagi ASN yang bertugas 2. Menggunakan sistem informasi atau aplikasi terintegrasi antar Perangkat daerah untuk meminimalisir keterlambatan data 3. Menyusun Rencana Aksi Tindak Lanjut sebagai komitmen perbaikan data untuk tahun anggaran berikutnya sebagai dari hasil evaluasi



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			KETERANGAN		REKOMENDASI TINDAK LANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							rencanakan atau yang sudah ditargetkan.	3. Belum adanya Rencana Aksi Tindak Lanjut sebagai komitmen perbaikan data untuk tahun anggaran berikutnya sebagai dari hasil evaluasi	
5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	13	13	100	1. Ketersediaan data sebagai data pendukung perangkat daerah dalam proses Perencanaan Penyusunan Dokumen ini 2. Ketersediaan anggaran yang cukup untuk mendukung kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 3. Kebijakan sudah cukup jelas yang akan mengatur untuk penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1. Kurangnya data dan informasi dari perangkat daerah yang diberikan sebagai dasar pembuatan dokumen tersebut 2. Kurangnya sinkronisasi antar Perangkat Daerah	1. Diperlukan Koordinasi dan sinkronisasi data kepada Perangkat Daerah untuk mendukung pembuatan Dokumen tersebut 2. Mengevaluasi setiap data yang diberikan oleh Perangkat Daerah agar sesuai dengan data yang berlaku untuk pendukung dokumen yang diperoleh



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			KETERANGAN		REKOMENDASI TINDAK LANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							4. Koordinasi dan Dukungan dari Pimpinan untuk membuat suatu dokumen kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan 5. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan program tersebut		
6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	13	13	100	1. Adanya kebijakan (SE) atau surat Keputusan (SK) terkait mekanisme dan waktu untuk penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah 2. Adanya sistem informasi atau Aplikasi untuk menggunggah Data secara Real untuk menghindari data yang hilang 3. tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung proses asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat	1. Pemahaman dalam penyusunan dokumen perangkat daerah yang tidak sesuai dengan SE yang dan Surat Keputusan (SK) mekanisme penyusunan dokumen 2. Kurangnya Pemahaman SDM evaluator terhadap substansi dokumen	1. Melaporkan hasil asistensi penyusunan dokumen 2. Membuat dokumentasi, berita acara tentang hasil Verifikasi terhadap dokumen perencanaan perangkat daerah yang dilakukan



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			KETERANGAN		REKOMENDASI TINDAK LANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							daerah bidang Pembangunan Manusia. 4. Tersedianya anggaran yang mendukung kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia.	perencanaan perangkat daerah	
7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	13	13	100	1. Tersedianya Dukungan Sarana dan prasarana untuk memproses verifikasi 2. Tersedianya sistem informasi/aplikasi Epantau-NG 3. Tersedianya Dokumen dan data pendukung dari Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 4. Tersedianya Jadwal dan rencana untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi	1. Data dan informasi Perangkat Daerah dalam inputing kurang akurat 2. Keterlambatan pelaporan dari Perangkat Daerah	1. Penguatan verifikasi data dan informasi pelaporan Perangkat Daerah 2. Komitmen kepatuhan dan ketepatan waktu input data pelaporan
8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan	Jumlah dokumen Koordinasi Pelaksanaan	Laporan	1	1	100	1. Tersedianya Dukungan Sarana dan prasarana 2. Tersedianya Anggaran dan SDM untuk pelaksanaan	1. Keterbatasan SDM dalam pelaksanaan Koordinasi	1. Peningkatan Kompetensi SDM dengan memberikan pelatihan teknis terkait



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			KETERANGAN		REKOMENDASI TINDAK LANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia					Koordinasi Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 3. Tersedianya Narasumber yang menguasai substansi penyusunan dokumen 4. Tersedianya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan menengah sebagai dasar untuk menentukan arah kebijakan dalam pelaksanaan sinergitas. 5. Tersusunnya output/Dokumen yang di rencanakan atau yang sudah ditargetkan.	Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 2. Mekanisme birokrasi yang lamban dari perangkat daerah dalam pemenuhan kebutuhan data yang di butuhkan oleh narasumber pada saat penyusunan dokumen 3. Belum adanya Rencana Aksi Tindak Lanjut sebagai komitmen perbaikan data untuk tahun anggaran berikutnya sebagai dari hasil evaluasi	pengelolaan dan analisis data kinetja bagi ASN yang bertugas 2. Menggunakan sistem informasi atau aplikasi terintegrasi antar Perangkat daerah untuk meminimalisir keterlambatan data 3. Menyusun Rencana Aksi Tindak Lanjut sebagai komitmen perbaikan data untuk tahun anggaran berikutnya sebagai dari hasil evaluasi



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			KETERANGAN		REKOMENDASI TINDAK LANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III.2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Dokumen	40	40	100	1. Sinergitas Tim : Koordinasi solid antara Bidang EkoSDA, Mitra, dan Narasumber memastikan penyelesaian dokumen tepat waktu. 2. Ketersediaan Data : Dukungan data sektoral yang responsif dari OPD teknis (Diskan, Distanak, dll) melancarkan proses analisis dokumen.	Secara umum tidak ada kendala berarti. Namun, padatnya agenda akhir tahun pada OPD mitra sempat menyebabkan sedikit keterlambatan dalam proses konfirmasi dan validasi data akhir untuk penyusunan dokumen asistensi.	Memajukan jadwal desk asistensi dan validasi data sektoral secara bertahap sejak Triwulan III, serta mengoptimalkan penggunaan platform berbagi data agar proses finalisasi tidak menumpuk di akhir tahun saat agenda OPD sedang padat.



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			KETERANGAN		REKOMENDASI TINDAK LANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembanguna n Daerah Bidang Perekonomia n (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembanguna n Daerah Bidang Perekonomia n (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	6	6	100	1. Ketersediaan data sebagai data pendukung perangkat daerah dalam proses Perencanaan Penyusunan Dokumen 2. Ketersediaan anggaran yang cukup untuk mendukung kegiatan Penyusunan Dokumen 3. Kebijakan sudah cukup jelas yang akan mengatur untuk penyusunan Dokumen 4. Koordinasi dan Dukungan dari Pimpinan untuk membuat suatu dokumen kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian 5. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan program tersebut	1. Kurangnya data dan informasi dari perangkat daerah yang diberikan sebagai dasar pembuatan dokumen tersebut 2. Kurangnya sinkronisasi antar Perangkat Daerah 3. Kurangnya dana untuk menyusun dokumen tersebut	1. Diperlukan Koordinasi dan sinkronisasi data kepada Perangkat Daerah untuk mendukung pembuatan Dokumen tersebut 2. Mengevaluasi setiap data yang diberikan oleh Perangkat Daerah agar sesuai dengan data yang berlaku untuk pendukung dokumen yang diperoleh 3. untuk meningkatkan efisiensi dan konsistensi terutama dalam konteks penganggaran, penatausahaan, hingga pelaksanaan dan evaluasi pembangunan Daerah



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			KETERANGAN		REKOMENDASI TINDAK LANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembanguna n Perangkat Daerah Bidang Perekonomia n	Jumlah dokumen Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembanguna n Perangkat Daerah Bidang Perekonomia n	Laporan	6	6	100	1. Tersedianya data pendukung dalam proses Perencanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan-PD bidang Perekonomian 2. Ketersediaan anggaran yang cukup untuk mendukung kegiatan Asistensi Dokumen Perencanaan bidang Perekonomian 3. Regulasi yang mengatur sudah cukup jelas untuk Asistensi Dokumen Perencanaan bidang Perekonomian 4. Koordinasi dan Dukungan dari Pimpinan untuk melaksanakan Asistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian 5. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan dimaksud	1. Lambatnya sebagian Perangkat daerah dalam merespon koordinasi dengan BAPPEDA dalam pelaksanaan Asistensi; 2. Kurangnya data dan informasi pendukung dari perangkat daerah yang disampaikan sebagai dasar pelaksanaan Asistensi Dokumen Perencanaan bidang Perekonomian	1. Koordinasi lebih lanjut dengan perangkat daerah agar lebih responsif, dalam koordinasi dengan BAPPEDA agar pelaksanaan Asistensi berjalan lancar; 2. Memastikan ketersediaan data secara lengkap guna mengefektifkan pelaksanaan Asistensi dokumen



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			KETERANGAN		REKOMENDASI TINDAK LANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	6	6	100	2.Ketersediaan anggaran yang cukup untuk mendukung kegiatan Penyusunan Dokumen 3.Kebijakan sudah cukup jelas yang akan mengatur untuk penyusunan Dokumen	1. Data dan informasi Perangkat Daerah kurang akurat 2. Keterlambatan pelaporan dari Perangkat Daerah	1.Penguatan verifikasi data dan informasi pelaporan Perangkat Daerah 2.Komitmen kepatuhan dan ketepatan waktu pelaporan
4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	4	4	100	1.Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung terselesaikannya dokumen kegiatan 2. Adanya dukungan pimpinan dalam rangka pelaksanaan pencapaian kinerja kegiatan 3. Ketersediaan anggaran yang cukup untuk mendukung pelaksanaan kegiatan 4. Ketersediaan Sistem	1. Belum optimalnya data dan informasi yang disampaikan oleh perangkat daerah 2. Kurangnya sumber daya manusia dari segi kualitas dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan	1. Diperlukan koordinasi dan sinkronisasi data antar perangkat 2. Penguatan dan perbaikan sistem informasi sebagai pendukung pengumpulan dan sinkronisasi data perangkat daerah 3. Melakukan peningkatan kompetensi melalui Pendidikan,



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			KETERANGAN		REKOMENDASI TINDAK LANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Informasi sebagai alat bantu dalam proses monitoring dan evaluasi		pelatihan ,workshop bagi sumber daya manusia bidang perekonomian dan SDA



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			KETERANGAN		REKOMENDASI TINDAK LANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembanguna n Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembanguna n Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	5	5	100	5. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan program tersebut	1. Kurangnya data dan informasi dari perangkat daerah yang diberikan sebagai dasar pembuatan dokumen tersebut 2. Kurangnya sinkronisasi antar Perangkat Daerah 3. Kurangnya dana untuk menyusun dokumen tersebut	1. Diperlukan Koordinasi dan sinkronisasi data kepada Perangkat Daerah untuk mendukung pembuatan Dokumen tersebut 2. Mengevaluasi setiap data yang diberikan oleh Perangkat Daerah agar sesuai dengan data yang berlaku untuk pendukung dokumen yang diperoleh 3. untuk meningkatkan efisiensi dan konsistensi terutama dalam konteks penganggaran, penatausahaan, hingga pelaksanaan dan evaluasi pembangunan Daerah



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			KETERANGAN		REKOMENDASI TINDAK LANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembanguna n Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembanguna n Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	5	5	100	1. Tersedianya data pendukung dalam proses Perencanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan-PD bidang SDA 2. Ketersediaan anggaran yang cukup untuk mendukung kegiatan Asistensi Dokumen Perencanaan bidang SDA 3. Regulasi yang mengatur sudah cukup jelas untuk Asistensi Dokumen Perencanaan bidang SDA 4. Koordinasi dan Dukungan dari Pimpinan untuk melaksanakan Asistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Kurangnya data dan informasi pendukung dari perangkat daerah yang disampaikan sebagai dasar pelaksanaan Asistensi Dokumen Perencanaan bidang Perekonomian	Memastikan ketersediaan data secara lengkap guna mengefektifkan pelaksanaan Asistensi dokumen



NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			KETERANGAN		REKOMENDASI TINDAK LANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	5	5	100	1. Tersedianya Dukungan Sarana dan prasarana 2. Tersedianya Dokumen dan data pendukung dari Perangkat Daerah 3. Tersedianya Jadwal dan rencana untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi 4. Tersedianya sistem informasi Epantau-NG	1. Data dan informasi Perangkat Daerah kurang akurat 2. Keterlambatan pelaporan dari Perangkat Daerah	1. Penguatan verifikasi data dan informasi pelaporan Perangkat Daerah 2. Komitmen kepatuhan dan ketepatan waktu pelaporan
8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Laporan	3	3	100	1. Tersedianya Dukungan Sarana dan prasarana 2. Tersedianya Dokumen dan data pendukung dari Perangkat Daerah 3. Tersedianya Jadwal dan rencana untuk pelaksanaan 4. Tersedianya Narasumber yang menguasai substansi penyusunan dokumen	1. Data dan informasi Perangkat Daerah kurang update dan akurat 2. Masih kurangnya transfer knowledge terhadap SDM bidang perencanaan	1. Penguatan verifikasi data dan informasi dari Perangkat Daerah 2. Perlunya penguatan SDM bidang perencanaan melalui transfer knowledge
III.3	Koordinasi Perencanaan Bidang	Jumlah dokumen perencanaan	Dokumen	8	8	100	1. Tersedianya anggaran untuk mendukung pelaksanaan koordinasi di	1. Kurangnya Koordinasi antar perangkat daerah	1. Diperlukan koordinasi dan fasilitasi untuk sinkronisasi data antar



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			KETERANGAN		REKOMENDASI TINDAK LANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Infrastruktur dan Kewilayahan	bidang Infrastruktur dan Kewilayahan					bidang Infrastruktur dan kewilayahan 2.Tersedianya kebijakan atau regulasi yang mendukung proses koordinasi di bidang Infrastruktur dan kewilayahan 3.Adanya koordinasi dan dukungan dari pimpinan 4. tersedia sarana dan prasarana	dalam pemenuhan target yang seharusnya saling mendukung. 2. Kurangnya data dan informasi dari perangkat daerah sebagai dasar penyusunan dokumen 3. Kurangnya pemahaman SDM dalam memberikan penjelasan terhadap substansi koordinasi kepada perangkat daerah	perangkat bidang perencanaan Infrastruktur dan kewilayahan 2. Penguatan dan perbaikan sistem informasi sebagai pendukung pengumpulan dan sinkronisasi data perangkat daerah 3. Penguatan SDM evaluator bidang infrastruktur dan kewilayahan
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD,	Jumlah dokumen Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Dokumen	1	1	100	1. Ketersediaan data sebagai data pendukung perangkat daerah dalam proses Perencanaan Penyusunan Dokumen ini 2.Ketersediaan anggaran yang cukup untuk mendukung kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	1.Kurangnya data dan informasi dari perangkat daerah yang diberikan sebagai dasar pembuatan dokumen tersebut 2. Kurangnya sinkronisasi antar Perangkat Daerah	1.Diperlukan Koordinasi dan sinkronisasi data kepada Perangkat Daerah untuk mendukung pembuatan Dokumen tersebut 2. Mengevaluasi setiap data yang diberikan oleh Perangkat Daerah agar sesuai dengan data



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			KETERANGAN		REKOMENDASI TINDAK LANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	RPJMD dan RKPD)	(RPJPD, RPJMD dan RKPD)					Daerah Bidang Infrastruktur 3. Kebijakan sudah cukup jelas yang akan mengatur untuk penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Infrastruktur 4. Koordinasi dan Dukungan dari Pimpinan untuk membuat suatu dokumen kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur 5. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan program tersebut		yang berlaku untuk pendukung dokumen yang diperoleh



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			KETERANGAN		REKOMENDASI TINDAK LANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembanguna n Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembanguna n Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	1	1	100	1.Adanya kebijakan (SE) atau surat Keputusan (SK) terkait mekanisme dan waktu untuk penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah 2. Adanya sistem informasi atau Aplikasi untuk menggunggah Data secara Real untuk menghindari data yang hilang 3.tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung proses asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastuktur. 4. Tersedianya anggaran yang mendukung kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1.Pemahaman dalam penyusunan dokumen perangkat daerah yang tidak sesuai dengan SE yang dan Surat Keputusan (SK) mekanisme penyusunan dokumen 2.Kurangnya Pemahaman SDM evaluator terhadap subtansi dokumen perencanaan perangkat daerah	1.Melaporkan hasil asistensi penyusunan dokumen 2.Membuat dokumentasi,berita acara tentang hasil koreksi terhadap dokumen perencanaan perangkat daerah yang dilakukan



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			KETERANGAN		REKOMENDASI TINDAK LANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	1	1	100	1. Tersedianya anggaran untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi 2. Adanya Komitmen Perangkat daerah untuk Melakukan Pelaporan Pelaksanaan Program, Kegiatan dan sub kegiatan	1. Pengumpulan data tidak lengkap dapat menyebabkan evaluasi yang tidak tepat dan informasi yang kurang akurat 2. Keterlambatan Pengampu kegiatan di perangkat daerah dalam melakukan pelaporan sehingga memperlambat operator untuk melaporkan progres kegiatan	1. Penguatan dan perbaikan sistem informasi sebagai pendukung pelaksanaan MONEV 2. Penguatan SDM Evaluator
4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan	1	1	100	1. Tersedianya Dukungan Sarana dan prasarana 2. Tersedianya Anggaran dan SDM untuk pelaksanaan Koordinasi Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur 3. Tersedianya Narasumber yang menguasai substansi	1. Keterbatasan SDM dalam pelaksanaan Koordinasi Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1. Menggunakan sistem informasi atau aplikasi terintegrasi antar Perangkat daerah untuk meminimalisir keterlambatan data 2. Peningkatan Kompetensi SDM dengan memberikan pelatihan teknis terkait



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			KETERANGAN		REKOMENDASI TINDAK LANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Bidang Infrastruktur					penyusunan dokumen 4. Tersedianya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan menengah sebagai dasar untuk menentukan arah kebijakan dalam pelaksanaan sinergitas.	2. Mekanisme birokrasi yang lamban dari perangkat daerah dalam pemenuhan kebutuhan data yang di butuhkan oleh narasumber pada saat penyusunan dokumen	pengelolaan dan analisis data kinetja bagi ASN yang bertugas 3. Rencana Aksi Tindak Lanjut sebagai komitmen perbaikan data untuk tahun anggaran berikutnya sebagai dari hasil evaluasi
5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	1	100	1. Ketersediaan data sebagai data pendukung perangkat daerah dalam proses Perencanaan Penyusunan Dokumen ini 2. Ketersediaan anggaran yang cukup untuk mendukung kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur 3. Kebijakan sudah cukup jelas yang akan mengatur untuk penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang	1. Kurangnya data dan informasi dari perangkat daerah yang diberikan sebagai dasar pembuatan dokumen tersebut 2. Kurangnya sinkronisasi antar Perangkat Daerah	1. Diperlukan Koordinasi dan sinkronisasi data kepada Perangkat Daerah untuk mendukung pembuatan Dokumen tersebut 2. Mengevaluasi setiap data yang diberikan oleh Perangkat Daerah agar sesuai dengan data yang berlaku untuk pendukung dokumen yang diperoleh



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			KETERANGAN		REKOMENDASI TINDAK LANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Infrastruktur 4. Koordinasi dan Dukungan dari Pimpinan untuk membuat suatu dokumen kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur 5. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan program tersebut		
6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	1	1	100	1. Adanya kebijakan (SE) atau surat Keputusan (SK) terkait mekanisme dan waktu untuk penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah 2. Adanya sistem informasi atau Aplikasi untuk menggunggah Data secara Real untuk menghindari data yang hilang 3. tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung proses asistensi penyusunan dokumen perencanaan	1. Pemahaman dalam penyusunan dokumen perangkat daerah yang tidak sesuai dengan SE yang dan Surat Keputusan (SK) mekanisme penyusunan dokumen 2. Kurangnya Pemahaman SDM evaluator terhadap substansi dokumen	1. Melaporkan hasil asistensi penyusunan dokumen 2. Membuat dokumentasi, berita acara tentang hasil koreksi terhadap dokumen perencanaan perangkat daerah yang dilakukan



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			KETERANGAN		REKOMENDASI TINDAK LANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur. 4. Tersedianya anggaran yang mendukung kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	perencanaan perangkat daerah	
7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	1	1	100	1. Tersedianya anggaran untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi 2. Adanya Komitmen Perangkat daerah untuk Melakukan Pelaporan Pelaksanaan Program, Kegiatan dan sub kegiatan	1. Pengumpulan data tidak lengkap dapat menyebabkan evaluasi yang tidak tepat dan informasi yang kurang akurat 2. Keterlambatan Pengampu kegiatan di perangkat daerah dalam melakukan pelaporan sehingga memperlambat operator untuk melaporkan progres kegiatan	1. Penguatan dan perbaikan sistem informasi sebagai pendukung pelaksanaan MONEV 2. Penguatan SDM Evaluator
8	Koordinasi Pelaksanaan	Jumlah dokumen	Laporan	3	3	100	1. Tersedianya Dukungan Sarana dan prasarana	1. Keterbatasan SDM dalam	1. Menggunakan sistem informasi atau aplikasi



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			KETERANGAN		REKOMENDASI TINDAK LANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan					2. Tersedianya Anggaran dan SDM untuk pelaksanaan Koordinasi Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur 3. Tersedianya Narasumber yang menguasai substansi penyusunan dokumen 4. Tersedianya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan menengah sebagai dasar untuk menentukan arah kebijakan dalam pelaksanaan sinergitas.	pelaksanaan Koordinasi Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur 2. Mekanisme birokrasi yang lamban dari perangkat daerah dalam pemenuhan kebutuhan data yang di butuhkan oleh narasumber pada saat penyusunan dokumen	terintegrasi antar Perangkat daerah untuk meminimalisir keterlambatan data 2. Peningkatan Kompetensi SDM dengan memberikan pelatihan teknis terkait pengelolaan dan analisis data kinetja bagi ASN yang bertugas 3. Rencana Aksi Tindak Lanjut sebagai komitmen perbaikan data untuk tahun anggaran berikutnya sebagai dari hasil evaluasi

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, 2025

Berangkat dari anatomi matriks di atas, evaluasi kinerja Bappeda dapat dikonstruksikan melalui tiga klaster program utama yang berkontribusi secara fundamental terhadap ekosistem perencanaan pembangunan daerah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten Kota

Program ini bertindak sebagai tulang punggung tata kelola internal. Faktor pendukung utama keberhasilan pada klaster ini adalah masifnya digitalisasi melalui optimalisasi aplikasi terintegrasi seperti SIPD dan e-Pantau, serta tingginya komitmen pimpinan dalam menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Namun, secara objektif organisasi masih menghadapi residu hambatan administratif, seperti keterlambatan pengumpulan data capaian kinerja dari beberapa unit dan dinamika regulasi pusat. Bappeda merespons tantangan ini melalui kebijakan penunjukan *Person in Charge* (PIC) data secara spesifik di setiap bidang/bagian untuk mempercepat lalu lintas informasi, serta melaksanakan intervensi peningkatan kompetensi (Diklat/Bimtek) guna mengatasi kesenjangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

2. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan

Tingginya realisasi pada indikator sasaran daerah merupakan wujud keberhasilan kegiatan pada klaster ini. Intervensi kebijakan berjalan efektif berkat adanya instrumen sistem informasi terintegrasi dan dukungan regulasi daerah yang jelas. Kendala operasional yang teridentifikasi berpusat pada ketersediaan data makro dari produsen data (Perangkat Daerah) yang kerap belum sepenuhnya komprehensif di awal tahun, serta fluktuasi komitmen dalam tahapan monitoring dan evaluasi (monev). Bappeda berfokus pada penguatan mekanisme verifikasi data, percepatan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan data, serta pelembagaan forum *desk* pendampingan dan pembinaan agar Perangkat Daerah lebih presisi dalam melaporkan capaian fisiknya.

3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan

Klaster ini merupakan representasi fungsi Bappeda sebagai *clearing house* pembangunan daerah. Keberhasilannya ditopang oleh kecukupan anggaran dan pedoman koordinasi yang terstruktur. Dalam pelaksanaannya, Bappeda mengidentifikasi hambatan struktural di mana beberapa Perangkat Daerah (OPD) teknis masih terjebak pada ego sektoral (*silo mentality*) dan sekadar berfokus pada target internal, sehingga sinergi lintas urusan menjadi kurang

optimal. Selain itu, penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) oleh pusat menuntut rasionalisasi kegiatan di tengah tahun berjalan. Menghadapi dinamika ini, Bappeda merumuskan tiga langkah fundamental, (1) Mendorong pendekatan perencanaan berbasis *outcome* yang terintegrasi lintas sektor; (2) Membangun perencanaan anggaran yang adaptif dan berbasis skala prioritas tinggi agar kebal terhadap rasionalisasi fiskal; serta (3) Mentransformasikan forum money agar tidak sekadar berorientasi pada pemenuhan kewajiban pelaporan, melainkan menjadi instrumen perbaikan kinerja (*continuous improvement*).

Integrasi antara perencanaan yang tajam, pengendalian yang disiplin, dan tata kelola internal yang efisien merupakan formula kunci Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2025. Analisis komprehensif pada tabel di atas membuktikan kedewasaan Bappeda sebagai institusi pembelajar (*learning organization*) yang tidak sekadar merayakan keberhasilan pencapaian target, tetapi juga secara proaktif menjadikan setiap tantangan operasional sebagai ruang penyempurnaan (*room for improvement*) guna merumuskan strategi perbaikan yang sistemik dan berkelanjutan di tahun mendatang.

3.1.9 Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP Tahun Sebelumnya

Laporan hasil evaluasi Implementasi pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel 3.9 Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 dan 2025

NO	KOMPONEN	TAHUN 2024		TAHUN 2025	
		BOBOT	NILAI	BOBOT	NILAI
1	Perencanaan Kinerja	30	23,92	30	23,78
2	Pengukuran Kinerja	30	22,00	30	22,06
3	Pelaporan Kinerja	15	9,10	15	12
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	17,76	25	20
Total		100	72,78	100	77,84
Kategori			BB		BB
Interprestasi			Sangat Baik		Sangat Baik

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Dari segi perencanaan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a) Pohon kinerja Tingkat Kabupaten sebagai dasar penjenjangan kinerja untuk menghasilkan outcome diinginkan belum disusun sehingga berdampak pada kualitas perjanjian kinerja Tahun 2025 memuat perjanjian kinerja yang tidak relevan dengan IKU yang merepresentasikan kinerja utama perangkat daerah. Sasaran perjanjian kinerja yang tidak relevan tersebut tidak memiliki keterkaitan antara program/kegiatan yang diampu oleh perangkat daerah. Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa "Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan". Untuk tingkat Eselon II sasaran yang digunakan menggambarkan outcome pada bidangnya serta menggunakan Indikator Kinerja Utama Eselon II.
- b) Perjanjian kinerja belum selaras dengan dokumen perencanaan perangkat daerah baik jangka menengah maupun jangka pendek, terhadap adanya perubahan perjanjian kinerja perlu diselaraskan dengan dokumen perencanaan jangka menengah dan/atau jangka pendek Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa "target kinerja yang diperjanjikan mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun - tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya"
- c) Dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka pendek perangkat daerah belum menyajikan informasi atas ketidak tercapaian target pada periode sebelumnya dan belum mengungkapkan penjelasan atau analisa

yang mendalam dan komprehensif. Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengatur bahwa dokumen perencanaan Pembangunan daerah sekurang – kurangnya mengemukakan interpretasi atas hasil evaluasi capaian kinerja periode sebelumnya dengan memuat: 1) Ada/tidaknya kesenjangan/gap pelayanan 2) Pada pelayanan mana saja target telah tercapai dan tidak tercapai 3) Faktor keberhasilan dan kegagalan pelayanan 4) Faktor - faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan perangkat daerah, misalnya prosedur/mekanisme, jumlah dan kualitas personal (sumberdaya manusia), progres pelaksanaan program, dan sebagainya

2. Pengukuran Kinerja

Dari segi pengukuran kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

Pengukuran kinerja telah dilakukan secara elektronik menggunakan aplikasi E-Pantau, namun terdapat permasalahan bahwa pengukuran kinerja yang dilakukan oleh perangkat daerah belum sepenuhnya berdasarkan hasil kinerja yang dilaksanakan oleh perangkat daerah tersebut. Hal tersebut disebabkan adanya permasalahan pada kualitas perjanjian kinerja Tahun 2025 yang masih memuat perjanjian kinerja yang tidak relevan dengan IKU perangkat daerah dan belum dilengkapi definisi operasional pada setiap indikatornya.

3. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dari segi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a. Perangkat daerah telah melaksanakan evaluasi mandiri SAKIP, namun kualitas tim evaluator internal masih perlu dilakukan peningkatan kompetensi dan keterlibatan dalam hal implementasi SAKIP.
- b. Proses evaluasi kinerja internal perangkat daerah belum sepenuhnya terdokumentasi dengan baik dan belum dilaksanakan secara periodik

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Memperbaiki kualitas Pohon Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021;
2. Perbaiki kualitas Perjanjian Kinerja sehingga benar-benar merepresentasikan kinerja Perangkat Daerah dalam hal sasaran dan indikator, dan jika terjadi perubahan target agar dilakukan penyesuaian pada Dokumen Perencanaan terkait;
3. Perbaiki kualitas dokumen perencanaan kinerja terutama dalam hal penyajian informasi dan analisis penyebab tidak tercapainya target secara memadai;
4. Melengkapi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dengan manual IKU yang memuat sekurang-kurangnya deskripsi indikator, definisi operasional, formulasi perhitungan indikator dan sumber data;
5. Meningkatkan kompetensi dan keterlibatan tim evaluator internal dalam hal evaluasi dan implementasi SAKIP di Perangkat Daerah.

Rencana Tindaklanjut dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai berikut :

1. Sudah dilakukan perbaikan terhadap kualitas pohon kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) periode 2025-2029
2. Sudah dilakukan perbaikan terhadap kualitas perjanjian kinerja pada perjanjian kinerja 2025 sesuai dengan sasaran dan indikator perangkat daerah dan dilakukan juga penyesuaian pada perjanjian kinerja 2025 perubahan dengan melakukan penyesuaian target
3. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah telah dituangkan dalam dokumen dengan memuat sekurang-kurangnya deskripsi indikator, definisi operasional, formulasi perhitungan indikator, dan sumber data
4. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah telah dituangkan dalam dokumen dengan memuat sekurang-kurangnya deskripsi indikator, definisi operasional, formulasi perhitungan indikator, dan sumber data memuat sekurang-kurangnya deskripsi indikator, definisi Operasional, formulasi perhitungan indikator, dan sumber data

5. Sudah ditindaklanjuti dengan melakukan peningkatan kompetensi mengikuti webinar dengan tema " Strategi Penyusunan Dokumen LKjiP" dan melibatkan tim evaluator internal dalam hal evaluasi dan implementasi SAKIP di Perangkat Daerah

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam arsitektur Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), evaluasi kinerja tidak dapat dilepaskan dari dimensi akuntabilitas finansial. Realisasi anggaran bukan sekadar instrumen administratif untuk mengukur seberapa cepat dana dihabiskan (*budget absorption*), melainkan proksi utama untuk menilai keberhasilan implementasi *performance-based budgeting* (anggaran berbasis kinerja). Subbab ini membedah sejauh mana alokasi sumber daya fiskal yang dimandatkan kepada Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara telah dikelola secara presisi untuk membiayai target - target strategis sepanjang tahun 2025.

Rincian postur keuangan yang membedah anatomi alokasi pagu, realisasi belanja, hingga persentase capaian per program, kegiatan, dan sub kegiatan diuraikan secara komprehensif dalam matriks berikut :



Tabel 3.10 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ANGGARAN		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	36.598.794.501	30.115.969.354,00	82,29
I.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	423.695.920	268.642.411,00	63,40
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	286.955.800	153.525.741	53,50
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen capaian dan ikhtisar realisasi kinerja	Laporan	36.308.000	32.795.340	90,33
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	77.355.500	69.090.850	89,32



NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ANGGARAN		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
4	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara	23.076.620	13.230.480	57,33
I.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	16.526.209.186	15.129.885.240	91,55
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	Orang/Bulan	16.216.844.386	14.881.673.998	91,77



NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ANGGARAN		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	309.364.800	248.211.242	80,23
I.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Dokumen	119.892.400	85.122.600,00	71,00
1	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	27.600.000	21.407.000,00	77,56
2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	92.292.400	63.715.600	69,04
I.4	Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	856.946.836	704.255.515	82,18



NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ANGGARAN		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
		Jumlah Pakaian	Stel			
		Jumlah ASN	Orang			
1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	75.518.000	603.319.800	798,91
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	168.018.836	64.258.851	38,25
3	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	613.410.000	36.676.864	5,98
I.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	3.291.662.230	2.814.908.638	85,52



NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ANGGARAN		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	200.000.000	180.092.000	90,05
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis bahan logistik Kantor yang disediakan	Paket	550.000.000	500.571.800	91,01
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	397.611.800	347.851.337	87,49
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	270.000.000	43.980.000	16,29
5	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Bahan/Material yang disediakan	Paket	71.433.744	52.064.300	72,88
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Laporan	640.999.686	566.808.463	88,43



NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ANGGARAN		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip pada unit pencipta dan Pengolahan Arsip (UPPA) dan Arsip Pada Unit Kearsipan (UK)	Dokumen	374.307.000	347.742.884	92,90
8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Perangkat Daerah	Dokumen	787.310.000	775.797.854	98,54
I.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen	4.761.321.090	3.702.902.761	77,77
1	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Unit	423.533.000	2.020.000	0,48
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor	Unit	4.337.788.090	3.700.882.761	85,32



NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ANGGARAN		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
I.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	4.086.335.899	2.948.679.915	72,16
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Laporan	2.346.900.000	1.246.278.145	53,10
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa tenaga pendukung Non PNS	Laporan	1.739.435.899	1.702.401.770	97,87
I.8	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah	Persen	6.532.730.940	4.461.572.274	68,30



NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ANGGARAN		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	143.970.120	120.638.717	83,79
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	150.242.620	133.364.484	88,77
3	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	35.000.000	-	0,00



NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ANGGARAN		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
4	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4.242.506.340	2.326.587.938	54,84
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1.961.011.860	1.880.981.135	95,92
II	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan pada sasaran daerah	Persen	4.398.376.564	2.734.552.316,00	62,17
II.1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Dokumen	1.976.687.064	1.655.430.060,00	83,75
		Jumlah Pendampingan Perencanaan	Lembaga/OPD			



NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ANGGARAN		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
		Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik	kali			
		Jumlah Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Kali			
		Jumlah Pelaksanaan Musrenbang	Kali			
1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen	364.777.000	351.003.171	96,22
2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	525.233.668	433.355.105	82,51



NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ANGGARAN		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	90.000.000	74.936.000	83,26
4	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	70.801.000	44.330.500	62,61
5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	228.720.000	194.471.580	85,03
6	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan	19.985.096	17.825.096	89,19
7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	677.170.300	539.508.608	79,67



NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ANGGARAN		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
II.2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	Dokumen	1.367.433.500	570.135.987,00	41,69
		Jumlah Pendampingan Ketersediaan Data	Urusan			
		Jumlah Layanan Data dan Informasi Kecamatan	Layanan Data dan Informasi			
		Jumlah Rancangan Regulasi Daerah	Rancangan Regulasi			
		Jumlah Personil Pembinaan Data	Orang			
1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dokumen	661.486.500	228.855.895	34,60



NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ANGGARAN		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	443.727.000	142.568.790	32,13
3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku	262.220.000	198.711.302	75,78
II.3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	1.054.256.000	508.986.269,00	48,28



NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ANGGARAN		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Laporan	368.600.000	178.837.000	48,52
2	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Laporan	685.656.000	330.149.269	48,15
III	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan bidang perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan pada Renja-PD	Persen	5.604.120.870	4.664.010.475,00	83,22



NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ANGGARAN		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
		Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Renja-PD	Persen			
		Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan Bidang Bidang Sarana dan Prasarana Pengembangan Wilayah pada Renja-PD	Persen			
III.1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen	1.161.005.340	929.572.539,00	80,07



NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ANGGARAN		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	110.632.000	97.046.000	87,72
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	76.892.570	44.833.203	58,31



NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ANGGARAN		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	85.908.840	65.147.400	75,83
4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	223.060.770	215.108.011	96,43



NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ANGGARAN		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	81.408.640	52.583.900	64,59
6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	76.706.180	58.902.243	76,79



NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ANGGARAN		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	63.408.840	58.285.400	91,92
8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	442.987.500	337.666.382	76,22



NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ANGGARAN		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
III.2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Dokumen	2.889.144.300	2.590.601.873,00	89,67
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	100.518.000	77.405.500	77,01



NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ANGGARAN		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	88.328.450	73.247.065	82,93
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	64.658.000	25.195.000	38,97



NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ANGGARAN		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	1.603.830.200	1.546.336.275	96,42
5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	111.180.000	79.293.095	71,32



NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ANGGARAN		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	88.527.750	45.339.600	51,22
7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	53.586.000	17.246.000	32,18



NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ANGGARAN		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Laporan	778.515.900	726.539.338	93,32
III.3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Dokumen	1.553.971.230	1.143.836.063,00	73,61



NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ANGGARAN		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	125.584.150	90.980.940	72,45
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	93.367.540	52.267.960	55,98



NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ANGGARAN		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	59.830.440	36.880.000	61,64
4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	428.551.800	411.041.886	95,91



NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ANGGARAN		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	111.939.440	89.720.000	80,15
6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	92.917.420	55.650.000	59,89



NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ANGGARAN		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	46.731.440	31.356.000	67,10
8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	595.049.000	375.939.277	63,18

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, 2025

Berdasarkan konstelasi data pada Tabel 3.9 di atas, tata kelola keuangan Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2025 merepresentasikan performa eksekusi yang sangat rasional dan proporsional. Secara spesifik, kinerja penyerapan anggaran pada tiga pilar program makro dapat dipetakan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mencatatkan tingkat serapan anggaran sebesar 82,29%.
2. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dieksekusi dengan tingkat serapan sebesar 62,17%.
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, mencatatkan tingkat serapan agregat sebesar 83,22% dengan rincian Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 80,07%; Bidang Perencanaan Perekonomian dan SDA 89,67%; serta Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan 73,61%.

Dinamika serapan anggaran di atas tidak berdiri sendiri sebagai angka finansial semata, melainkan memiliki korelasi kausalitas yang sangat kuat terhadap ekselensi capaian kinerja Bappeda di tahun 2025. Tata kelola keuangan ini terbukti mampu menjadi daya ungkit (*leverage*) yang menggerakkan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) secara simultan :

1. Serapan anggaran yang moderat dan efisien pada Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah (62,17%) dan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (83,22%) terbukti sangat *cost-effective*. Dengan serapan yang tidak harus menyentuh batas maksimal 100%, Bappeda secara impresif mampu mendorong capaian IKU hingga melampaui ekspektasi. Hal ini dibuktikan dengan realisasi "Rata-rata Capaian Tujuan Daerah" yang menyentuh 103,97% dan "Capaian Sasaran Daerah" sebesar 101,36%. Ini menegaskan bahwa intervensi teknokratis dan orkestrasi pembangunan telah dijalankan dengan tingkat presisi yang tinggi, di mana *outcome* maksimal diraih melalui biaya operasional yang sangat hemat.
2. Serapan sebesar 82,29% pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan memberikan *return on investment* yang luar biasa terhadap penguatan arsitektur tata kelola internal.

Dinamika realisasi ini mencerminkan tata kelola birokrasi yang stabil, tangkas (*agile*), dan berorientasi pada hasil (*result-oriented*). Capaian persentase keuangan

yang berada pada rentang 62% hingga 89% mengindikasikan bahwa Bappeda berhasil menyeimbangkan antara kecepatan akselerasi program dan prinsip kehati-hatian (*prudence*) dalam pengelolaan kas. Sisa anggaran murni direpresentasikan sebagai "*Dividen Efisiensi*", sebuah bukti nyata bahwa organisasi memegang teguh prinsip *Value for Money*, di mana setiap rupiah yang diinvestasikan secara *absolut* bermuara pada nilai tambah (*public value*) bagi kualitas perencanaan dan tata kelola reformasi birokrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara.

3.3 Capaian Indikator Kinerja Utama Tambahan 2025

Pengukuran akuntabilitas sebuah institusi publik yang modern tidak cukup hanya ditakar dari keberhasilan misi utamanya (*core business*). Untuk mengukur tingkat kesehatan dan kedewasaan organisasi secara holistik (*organizational hygiene*), diperlukan evaluasi terhadap serangkaian Indikator Kinerja Utama Tambahan. Indikator-indikator komplementer ini berfungsi sebagai parameter untuk menilai sejauh mana Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat (*citizen-centric*). Rincian pencapaian target pada Indikator Kinerja Utama Tambahan sepanjang tahun anggaran 2025 disajikan pada matriks berikut:

Tabel 3.11 Capaian Indikator Kinerja Utama Tambahan 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	$7 = 6/5 \times 100$
1	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100	100	100
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	88,3	88,5	100,23
3	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas	Persen	100	100	100



NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5*100
	Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	audit LKPD Tahun sebelumnya				
4	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah	Level	3	3,827	127,57
5	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1	1	100
6	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100	100	100
7	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	100	100	100
8	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48	51	106,25
9	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,70	3,2568	88,02
10	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	77	65,59	85,18
11	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65	71,51	110,02
12	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	52,56	58,59	111,47

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	$7 = 6/5 \times 100$
13	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	4	3,89	97,25
14	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Predikat	Zona Hijau	Zona Hijau	100,00
15	Pengendalian Inflasi	Angka inflasi	Nilai	3,1	2,71	114,39

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, 2025

Berikut penjelasan dan analisis manajerial dari masing-masing Indikator Kinerja Utama Tambahan yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025:

1. Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik.

Indikator ini mencakup persentase pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP). Keterlibatan publik berhasil dieksekusi secara optimal dengan realisasi 100 persen dari target 100 persen. Capaian absolut ini membuktikan komitmen Bappeda terhadap paradigma perencanaan inklusif (*bottom-up planning*), memastikan bahwa setiap rumusan kebijakan pembangunan benar-benar merepresentasikan aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat.

2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat

Indikator ini berkenaan dengan mutu pelayanan Bappeda yang direpresentasikan melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Organisasi berhasil memperoleh nilai realisasi sebesar 88,5 poin, melampaui target yang ditetapkan yakni 88,3 poin (Capaian 100,23%). Peningkatan IKM ini merepresentasikan pergeseran orientasi birokrasi dari sekadar menggugurkan kewajiban administratif menjadi birokrasi yang *citizen-centric* (berpusat pada kepuasan penerima layanan).

3. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Indikator ini mengukur kepatuhan entitas dalam menyelesaikan tindak lanjut hasil temuan BPK atas audit LKPD. Bappeda menunjukkan tingkat kepatuhan absolut dengan realisasi 100 persen. Penyelesaian 100% ini merupakan indikator kuat atas integritas finansial organisasi dan efektivitas manajemen risiko dalam mencegah potensi kerugian negara di masa mendatang.

4. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Indikator ini berkaitan dengan tingkat kematangan sistem pengendalian internal. Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah berhasil dipertahankan pada Level 3,827 (Capaian 127,57,00%). SPIP pada Level 3 (Terkelola dan Terukur) mengonfirmasi bahwa ekosistem pengendalian internal Bappeda tidak lagi bersifat parsial, melainkan telah terinstitusionalisasi ke dalam setiap proses bisnis organisasi.

5. Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah

Indikator ini mendorong penciptaan terobosan di tingkat instansi yang diukur melalui Jumlah Inovasi Perangkat Daerah. Dari target 1 inovasi, telah berhasil direalisasikan 1 inovasi (Capaian 100%). Hal ini menunjukkan *agilitas* Bappeda dalam mendobrak kebuntuan rutinitas (*business as usual*) melalui pendekatan inovatif dalam merespons dinamika perencanaan daerah.

6. Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor

Indikator ini berkenaan dengan tingkat responsivitas organisasi dalam menangani keluhan masyarakat melalui kanal SP4N Lapor. Penyelesaian tindak lanjut direalisasikan secara tuntas 100 persen. Responsivitas 100% ini mencerminkan keterbukaan tata kelola (*open government*) dan kecepatan bertindak organisasi dalam menanggulangi *feedback public*.

7. Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia

Indikator ini meliputi kepatuhan keterinputan data pada portal Satu Data Indonesia dengan realisasi 100%. Capaian paripurna ini merupakan fondasi krusial bagi arsitektur perencanaan daerah, memastikan bahwa Bappeda telah sepenuhnya mengadopsi prinsip *Evidence-Based Policy* (kebijakan berbasis data yang valid dan terintegrasi).

8. Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di Perangkat Daerah

Indikator ini mencakup komitmen pembangunan sumber daya manusia di luar ranah teknokratis. Dari target 48 laporan, Bappeda merealisasikan penyusunan 51 laporan (Capaian 106,25%). *Achievement* pada indikator ini menegaskan bahwa Bappeda menyeimbangkan pengembangan kompetensi intelektual pegawainya dengan penguatan karakter dan kecerdasan spiritual (*core values*).

9. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Indikator ini diukur melalui kontribusi terhadap Nilai LPPD secara makro. Terdapat realisasi skor sebesar 3,2568 dari target 3,70 berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri No. 100.2.1.7-2109 Tahun 2025 (Capaian 88,02%). Kinerja ini menunjukkan kinerja yang "Baik" tapi masih belum optimal. Angka ini menandakan bahwa perencanaan dan pelaksanaan program sudah berjalan namun efektivitas dan efisiensi perlu ditingkatkan.

10. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Indikator ini meliputi perolehan Nilai SAKIP Kabupaten, dengan catatan capaian realisasi sebesar 65,59 dari target skor 77 (Capaian 85,18%). Angka ini menunjukkan bahwa fondasi akuntabilitas kinerja telah terbangun dengan predikat "Baik", sekaligus memberikan peta jalan objektif terkait area-area manajerial yang memerlukan akselerasi dan penyempurnaan di tahun berikutnya.

11. Meningkatkan Manajemen Birokrasi yang Efektif, Efisien, Inovatif, Akuntabel, Bersih dan Melayani

Indikator ini direpresentasikan oleh capaian Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kabupaten. Realisasi nilai mencapai 71,51, melampaui target sebesar 65 berdasarkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2024 Nomor: B/282/RB.06/2025 (Capaian 110,02%). Lompatan capaian Indeks RB ini adalah bukti nyata bahwa upaya debirokratisasi, penyederhanaan proses kerja, dan perbaikan area perubahan di Kabupaten Kutai Kartanegara telah membuahkan hasil yang diakui secara nasional.

12. Meningkatnya Inovasi Daerah

Indikator makro ini diukur melalui Indeks Inovasi Daerah. Kutai Kartanegara berhasil memperoleh skor 58,59 yang secara signifikan melampaui target awal sebesar 52,56 (Capaian 111,47%). Ekosistem yang sangat inovatif ini memperkuat daya saing daerah, membuktikan bahwa orkestrasi Bappeda mampu

menstimulasi Perangkat Daerah lain untuk menciptakan efisiensi melalui inovasi berkelanjutan.

13. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)

Indikator ini berkenaan dengan Indeks Pelayanan Publik, di mana diperoleh realisasi nilai sebesar 3,89 dari standar nilai ideal 4 berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Repormasi Birokrasi Indonesia Nomor 3 Tahun 2026 (Capaian 97,25%). Angka capaian yang mendekati tingkat kesempurnaan ini menunjukkan konsistensi Bappeda dalam menjaga standar operasional pelayanan yang prima dan profesional.

14. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (Kepatuhan)

Indikator ini menakar Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dari *Ombudsman*. Bappeda membuktikan konsistensinya dengan berhasil mempertahankan predikat Zona Hijau (Capaian 100,00%). Bertahannya predikat Zona Hijau merupakan afirmasi independen bahwa Bappeda sepenuhnya terbebas dari praktik maladministrasi dalam penyelenggaraan layanannya.

15. Pengendalian Inflasi

Indikator ini menyoroti peran pemerintah daerah dalam menekan laju pertumbuhan harga secara makro. Angka inflasi berhasil dikendalikan di level 2,71, berada lebih rendah dari batas maksimal target sebesar 3,1 (Capaian 114,39%). Secara prinsip ekonomi makro, realisasi di atas batas maksimal target adalah sebuah keberhasilan absolut. Hal ini mengonfirmasi efektivitas intervensi Bappeda dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas resiliensi ekonomi lokal.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 ini merupakan manifestasi pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Penyusunan dokumen ini merupakan pemenuhan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sekaligus menjadi wujud transparansi Bappeda kepada publik dan pemberi mandat.

LKjIP Tahun 2025 ini memegang peranan strategis sebagai instrumen rekam jejak (*track record*) yang menyajikan hasil evaluasi komprehensif atas kinerja organisasi. Laporan ini tidak sekadar menampilkan deretan angka capaian pada level Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, maupun Indikator Kinerja Utama (IKU) Tambahan, melainkan juga menyajikan telaah analitis terkait determinan keberhasilan, efisiensi anggaran, hingga identifikasi tantangan operasional sebagai fondasi perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*).

Pada tahun anggaran 2025, Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan 1 (satu) Indikator Tujuan dan 2 (dua) Indikator Sasaran sesuai dengan kerangka Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja. Secara *agregat*, Bappeda menorehkan performa yang sangat gemilang. Rincian pencapaian target strategis tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tingkat Capaian Tujuan Daerah dengan Indikator Rata-rata Capaian Indikator Tujuan Daerah berhasil direalisasikan dengan tingkat persentase capaian sebesar 103,97% (Kategori "Sangat Tinggi").
2. Tingkat Capaian Sasaran Daerah dengan Capaian sasaran ditopang oleh dua indikator ekselen, yakni (1) Skor Penilaian Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) yang menyentuh angka capaian 134,80%, serta (2) Rata-rata Capaian Indikator Sasaran Daerah dengan persentase 101,36% (Keduanya masuk dalam Kategori "Sangat Tinggi").

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, Bappeda secara absolut telah melampaui seluruh target yang diperjanjikan. Lebih dari itu, pencapaian target fisik (kinerja) tersebut diraih dengan tata kelola fiskal yang sangat sehat. Bappeda Kabupaten Kutai

Kartanegara terbukti mampu merealisasikan prinsip *Value for Money* dengan mencatatkan tingkat efisiensi sumber daya sebesar 23,47%. Dari total pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp46.601.291.935,00, organisasi berhasil mengoptimalkan serapan secara proporsional di angka 80,50% atau senilai Rp37.514.532.145,00.

Meskipun performa kinerja dan keuangan berada pada predikat "Sangat Tinggi", Bappeda sebagai institusi pembelajar (*learning organization*) secara objektif memetakan beberapa tantangan dan dinamika eksternal yang dihadapi sepanjang tahun 2025, di antaranya:

1. Keterbatasan yurisdiksi dan kewenangan dalam pelaksanaan beberapa program makro akibat batasan regulasi lintas tingkat pemerintahan.
2. Dinamika kebijakan dari pemerintah pusat, seperti adanya kebijakan efisiensi yang berujung pada ditiadakannya (moratorium) pelaksanaan penilaian PPD secara nasional pada tahun 2025.
3. Kendala operasional terkait belum sepenuhnya optimal pengumpulan data capaian dari beberapa Perangkat Daerah, serta masih ditemukannya residu ego sektoral (*silo mentality*) dalam perencanaan lintas urusan.

Sebagai respons strategis dan mitigasi perbaikan di masa mendatang, rekomendasi tindak lanjut yang akan diimplementasikan oleh Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara adalah:

1. Intensifikasi Koordinasi Vertikal dan Horizontal dengan memperkuat sinergi dengan pemerintah provinsi dan pusat terkait harmonisasi kewenangan, serta meningkatkan kolaborasi dengan sektor swasta, akademisi, dan masyarakat dalam perumusan inovasi pembangunan.
2. Kelembagaan Penjaminan Mutu Mandiri dengan mengantisipasi dinamika kebijakan pusat, Bappeda akan memperkuat fungsi asistensi dan reвью internal secara mandiri terhadap kualitas Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah agar tetap selaras dengan RPJMD.
3. Penguatan Tata Kelola Data dengan memperkuat mekanisme verifikasi dan validasi data capaian kinerja melalui kelembagaan forum *desk pendampingan* dan pemanfaatan sistem informasi terintegrasi.
4. Transformasi Perencanaan Lintas Sektor dengan mendorong arsitektur perencanaan yang sepenuhnya berbasis hasil (*outcome-based*) guna

mengeliminasi ego sektoral antar Perangkat Daerah Teknis dalam mengeksekusi program prioritas.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 ini, diharapkan dokumen ini dapat memberikan potret akuntabilitas yang utuh, transparan, dan terukur. Capaian positif ini didedikasikan kepada seluruh pihak—baik *stakeholders* utama, mitra kerja, maupun elemen masyarakat—yang telah mengambil peran dan berpartisipasi aktif dalam derap langkah membangun peradaban dan kemakmuran di Kabupaten Kutai Kartanegara.



Kutai Kartanegara, 27 Februari 2026
Kepala Badan Perencanaan Dan Pembangunan
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

WENDAH VANESA VILNA SIS, S.E., M.M
NIP. 19740217 199703 2 004



PEMERINTAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

